



PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

2025 - 2029



• DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL •

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini merupakan wujud nyata komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat. Dalam dokumen ini dijabarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola kependudukan yang tertib, akurat, dan terpadu.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari masukan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Akhir kata, kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN3

1.3.1 MAKSUD3

1.3.2 TUJUAN4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN4

BAB II6

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH6

2.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....6

2.1.1 Tugas Fungsi dan Stuktur Perangkat Daerah6

STRUKTUR ORGANISASI12

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....17

Tabel 2.117

Tabel 2.218

Tabel 2.318

Tabel 2.418

Potensi Sarana dan Prasarana18

Tabel 2.519

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil19

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan20

Peluang20

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan21

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis21

2.2.1 Permasalahan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil21

2.2.2 Isu Strategis.....22

BAB III24

TUJUAN, SASARAN, SRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN24

A. HEBAT24

B. SETIA.....25

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2029.....27

Tabel 3.127

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 202928

Tabel 3.228

Tabel 3.328

Tabel 3.429

Gambaran Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029.....30

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....31

Tabel 3.537

Tabel 3.641

3.1 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
44

BAB IV46

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....46

4.1 Uraian Program.....46

Tabel 4.151

4.2 Uraian Kegiatan52

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif54

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....66

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat66

Tabel 4.267

Tabel 4.369

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....69

Tahun 2025-202969

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 pendukung stunting69

Tabel 4.470

BAB V71

PENUTUP71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026, maka dengan berpedoman pada RPJM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyusun Renstra tahun 2025-2029 untuk menentukan arah tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar kegiatan tersebut memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan kerja untuk kurun waktu tahun yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana halnya masa RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat melalui berbagai tahap, mulai dari tahap persiapan penyusunan Renstra dengan membentuk Tim Penyusun Renstra OPD dan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan tahap penyusunan Rancangan Renstra, tahap penyusunan Rancangan Akhir, hingga tahap penetapan Renstra OPD. Keseluruhan proses tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lampung Barat, sehingga dapat terjadi sinkronisasi antar semua sektor pembangunan dalam suatu sistem yang sinergis dalam upaya melaksanakan misi serta mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, agar rencana jangka menengah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dalam bentuk kegiatan pembangunan, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dijabarkan dalam rencana tahunan yang disebut Perencanaan Kinerja (Renja) dan juga sebagai instrumen awal pengukuran kinerja.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Idiil dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah Pancasila serta landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lampung Barat bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Sistem Informasi kependudukan kepada masyarakat.

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448).
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452).
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);
 - n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - p. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Sistem perencanaan strategis merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, maka maksud dibuatnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang diemban oleh seluruh aparatur serta memberi arah yang jelas dan mampu memetakan

kebutuhan berbagai sumber dari pelayanan Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada masyarakat selama secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis, dan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai bentuk penjabaran dari pada Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus sebagai sebuah dokumen perencanaan program dalam kurun waktu 2026-2029 serta merupakan pegangan umum dalam pelaksanaan teknis operasional yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan tersebut mengacu pada tupoksi yang dalam pelaksanaannya terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia sesuai pada kondisi yang ada.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Kelompok sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra PDTahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rentra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II CASCADING

Lampiran III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Stuktur Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas kelompok Jabtan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Kepala Dinas

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Penetapan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan skala kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasin pelaksanaan kegiatan dilingkungan sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. Perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan
- d. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada BKAD disertai dengan penyerahan BKPb dan Surat Administrasi lainnya;
- e. Pengkoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- j. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana serta program kerja di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi Identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dikabupaten;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk skala kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- i. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian serta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusun rencana serta program kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Pengkoordinasian program kerja yang berhubungan dengan bimbingan pelayanan, penyelenggaraan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi Pelayanan Pencatatan Sipil skala kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi adm kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan rencana serta program kerja di bidang pengelolaan informasi adm kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;
- d. Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan program kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan meliputi seksi kerjasama dan inovasi pelayanan dan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi tugas :

- a. Penyusun rencana serta program kerja di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan skala kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- a. Pelaksanakan program kegiatan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Kepala UPTD Disdukcapil mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Disdukcapil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilingkup UPT Disdukcapil;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilingkup UPT Disdukcapil;
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan umum dan kepegawaian dilingkup UPT Disdukcapil;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada UPTD Disdukcapil.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Disdukcapil mempunyai uraian tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Disdukcapil yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPT Disdukcapil;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil sebagai pedoman dan landasan kerja;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, mencari pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- f. Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkup UPT Disdukcapil
- h. Menerbitkan dan menandatangani dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk yaitu biodata penduduk, KK, KIA, KTP-el dan surat keterangan pindah dan dokumen

hasil pelayanan pencatatan sipil seperti lahir mati, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawian dan pembatalan perkawinan. Sedangkan untuk hasil pelayanan pencatatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan nama diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Disdukcapil;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan surat Mendagri No 061/9934/DUKCAPIL Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023



Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat :

- a. Jumlah Pegawai
Berdasarkan data Kepegawaian Maret 2025, jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 26 ASN, terdiri dari 25 PNS dan 1 orang P3K
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Golongan Ruang :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	3 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	11 orang
5	Penata	III/c	3 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
8	Pengatur	II/c	2 orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
10	Pengatur Muda	II/a	-

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar adalah Sarjana.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	1 orang
2	Sarjana	23 orang
3	Sarjana Muda (D3)	-
4	SMA	1 orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat Pim II	1 orang
2	Diklat Pim III	orang
3	Diklat Pim IV	10 orang

- c. Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
- Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
JABATAN YANG TERISI

NO	JABATAN/FORMASI	TARGET (ORANG)	TERISI	BELUM TERISI
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris Dinas	1		1
3.	Kepala Bidang	4	3	1
4.	Kasubbag.	2	2	-
5.	Jabatan Fungsional	10	10	-
6.	Kepala UPT	1	1	-
7.	Kasubbag TU UPT	1	1	

Potensi Sarana dan Prasarana

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan perhatian. Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat salah satunya adalah kendaraan operasional.

Mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit pelayanan masyarakat dalam kepengurusan Dokumen administrasi kependudukan, yang salah satu inovasi pelayanannya adalah pelayanan jemput bola ke seluruh Kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka sangatlah penting adanya keberadaan

kendaraan operasional. Pada saat ini kendaraan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berjumlah :

Tabel 2.5
Jumlah Kendaraan Dinas

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit

Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional, dengan mempertimbangkan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan letaknya yang jauh dari kabupaten.

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-OPD Tahun 2025 sampai dengan DPA-SKPD Tahun 2029 dengan alokasi dana diperuntukan kegiatan di 5 (lima) bidang yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi
- 5) Administrasi Kependudukan
- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dinas yang memiliki kegiatan Pelayanan Terhadap Masyarakat dibidang Penataan Administrasi Kependudukan. Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan dan berjalan sesuai prosedur memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya up dating data kependudukan secara berkesinambungan dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Yang menjadi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
1	Pelayanan Kartu Keluarga (KK)	Pelayanan Akta Kelahiran
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	Pelayanan Akta Kematian
3	(KTP) Pelayanan Identitas	Pelayanan Akta Perkawinan
	Kependudukan Digital (IKD)	Pelayanan Akta Perceraian,
4	Perekaman e-KTP	Pengakuan/Pengesahan Anak
	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Serta Pengangkatan Anak
5	Pelayanan Surat Keterangan Pindah datang WNI	Pelayanan Akta Perubahan Nama
6	Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk tahun 2025-2029 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
- b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lampung Barat, tetapi identitas kependudukannya berada di luar Kabupaten Lampung Barat
- c. Standar pelayanan publik yang belum dapat diterapkan secara konsisten
- d. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang gratis, profesional dancepat
- e. Sarana dan prasarana belum memadai

Peluang

Berdasarkan identifikasi tantangan pelayanan tersebut diatas, maka ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Melaksanakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara perluasan metode layanan melalui penambahan titik layanan dengan menggunakan layanan secara mobile (Pelayanan Keliling)
- b. Penyusunan standar pelayanan publik yang mengedepankan upaya penyederhanaan prosedur, mempercepat waktu pelayanan dengan cara pelayanan yang profesional sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan
- c. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka menyajikan data dan informasi kependudukan kepada Masyarakat pengguna melalui internet.

- d. Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi online melalui call center dan mediasosial.
- e. Sumber daya manusia ASN cukup potensial.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Masyarakat merupakan kelompok utama dan paling luas yang menjadi sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebagai pemegang hak atas identitas hukum dan administrasi kependudukan, setiap warga negara Indonesia wajib tercatat dan memiliki dokumen kependudukan yang sah. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, bahkan sampai meninggal, dari penduduk tetap hingga non permanen membutuhkan pelayanan yang disediakan oleh Disdukcapil.

Pelayanan tersebut meliputi pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Disdukcapil juga melayani masyarakat dalam hal perubahan data, perpindahan domisili, hingga integrasi data untuk keperluan layanan publik lainnya.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatian pelayanan, Disdukcapil berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas biaya, guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Barat menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Masih Terbatas. Meskipun upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum memiliki dokumen resmi seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini antara lain adalah:
 - Kesadaran masyarakat yang rendah terkait pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
 - Aksesibilitas yang terbatas di daerah terpencil atau pelosok yang sulit dijangkau oleh jaringan, sehingga pelayanan terhambat jaringan internet.

- Keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Proses Pelayanan yang Kurang Efisien dan Memakan Waktu.
- Meskipun Disdukcapil telah berusaha meningkatkan kualitas layanan, namun dalam praktiknya, proses pengajuan dan penerbitan dokumen kependudukan masih menghadapi kendala administratif yang menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien. Beberapa permasalahan yang timbul terkait hal ini antara lain:
- Kurangnya petugas yang memadai untuk menangani volume permohonan yang tinggi
3. Terbatasnya Kerjasama dengan Stakeholder.
- Meskipun telah ada beberapa bentuk kerjasama dengan instansi dan pihak lain, namun masih banyaknya stakeholder yang belum terlibat aktif dalam pelayanan kependudukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan layanan. Beberapa hambatan yang muncul antara lain:
- Minimnya pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam pelayanan publik di kalangan berbagai pihak, terutama sektor swasta dan organisasi non-pemerintah.

2.2.2 Isu Strategis

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan dan sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi meliputi keterbatasan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, proses pelayanan yang kurang efisien dan keterbatasan kerjasama dengan stakeholder eksternal,. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan yang lebih baik dan efektif, Disdukcapil perlu melakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis yang harus menjadi prioritas untuk diperbaiki dan ditangani secara serius. Isu-isu strategis ini adalah faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat, serta memberikan arah yang jelas dalam merumuskan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek dan panjang.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu strategis yang menjadi tantangan terbesar bagi Disdukcapil, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat :

1. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Terkait isu ini, perlu adanya pendekatan intensif kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan perlu mengoptimalkan penggunaan layanan keliling atau jemput bola untuk menjangkau daerah yang terisolasi atau sulit dijangkau oleh pelayanan konvensional.

2. Meningkatkan Efisiensi Proses Pelayanan

Fokus pada perbaikan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi untuk mempercepat proses pendaftaran dan penerbitan dokumen serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelayanan agar mampu menangani volume permohonan secara optimal dan mengurangi waktu antrean.

3. Meningkatkan Kerjasama dengan Stakeholder

Peningkatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder (baik pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), guna memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, SRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah bagi perangkat daerah. Dalam menencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, karena dari strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Lampung Barat mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun pernyataan visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan dalam merumuskan tujuan serta sasaran sasaran adalah : **“Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”**.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti : Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian.
Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dankesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.

5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan.

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupunsosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.
3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.

Adapun makna Lampung Barat HEBAT DAN SETIA, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

Visi Lampung Barat sebagai Rumah Bersama yang “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)” selaras dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Visi masyarakat Lampung Barat yang menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan kelima penjelasan dari visi Kabupaten Lampung Barat selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dari pernyataan Visi Kabupaten Lampung Barat 2025–2029 tersebut selanjutnya di rumuskan misi yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah :

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.

Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

2) Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

3) Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.

Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

4) Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi dan upaya konservasi

5) Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.

Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

6) **Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah**

Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Dari pernyataan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 diatas akan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Memperhatikan uraian misi diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan pencapaian **misi ke-3** yaitu : **Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.**

3.1 **Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2029**

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Tujuan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam Bidang Urusan Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka tujuan jangka menengah.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dan indikator tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kabupaten Lampung Barat adalah :

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan	
Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan

Melalui tujuan ini, Disdukcapil berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Lampung Barat yang HEBAT dan SETIA.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu **"Terlaksananya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien,"** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah merumuskan dua sasaran strategis yang dapat mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing. Dua sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Persentase cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2	Meningkatnya Stakholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian Kerjasama	Persentase jumlah Stakholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian Kerjasama

Adapun tujuan, sasaran strategis dan target selama 5 tahun dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline		Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efesiensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	84,09	84,64	84,76	84,86	84,96	85,06	85,16

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline		Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efesiensi	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Persentase cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	67,67%	68,20 %	68,73%	69,26%	69,77%	70,30%	70,83 %
	Meningkatnya Stakholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	Persentase jumlah Stakholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian Kerjasama	28,57%	28,57 %	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100%

Gambaran Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan
RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029



3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 – 2029.

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan) adalah :
 1. Pelayanan Jemput bola (Pelayanan Keliling)
 2. Mengembangkan layanan online untuk pendaftaran, perubahan, dan pencetakan dokumen kependudukan.
 3. Melakukan kampanye aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
 4. Menyederhanakan persyaratan, mempercepat waktu proses, dan menghapuskan biaya layanan (gratis).
 5. Bekerja sama dengan desa/kelurahan, sekolah, rumah sakit, dan lembaga lain untuk integrasi layanan adminduk
 6. Menyasar penduduk rentan seperti lansia, penyandang disabilitas

Strategi-strategi tersebut tidak dilaksanakan secara parsial, melainkan dirancang dan diimplementasikan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan selama periode lima tahun, dengan mempertimbangkan kondisi awal capaian kinerja, ketersediaan sumber daya, karakteristik wilayah, serta dinamika kebijakan nasional dan daerah.

Strategi pencapaian sasaran meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional yang dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Tahapan ini disusun dengan memperhatikan fokus, lokus, serta prioritas program dan kegiatan setiap tahun, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra. Adapun tahapan strategi selama 5 tahun tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.5
Tahapan Strategi Sasaran Strategis 1 s.d. tahun 2030

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program / Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2026	Optimalisasi SDM pelayanan, pemanfaatan sarana pelayanan keliling, penataan SOP, dan penguatan sistem data kependudukan	Penguatan fondasi dan konsolidasi pelayanan administrasi kependudukan	Penataan sistem pelayanan, pemetaan wilayah prioritas, dan peningkatan akses dasar layanan	Desa/kelurahan dengan cakupan dokumen rendah dan wilayah, sekolah, kecamatan se kabupaten Lampung Barat	Program Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil, Fasilitas terkait Pencatatan Sipil.
Tahun 2027	Pemanfaatan TIK, penguatan kapasitas SDM layanan digital, dan dukungan anggaran pengembangan sistem	Perluasan jangkauan dan digitalisasi layanan administrasi kependudukan	Pengembangan layanan dan peningkatan kesadaran masyarakat	Desa/kelurahan dengan cakupan dokumen rendah dan wilayah, sekolah, kecamatan se kabupaten Lampung Barat	Program Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil, Fasilitas terkait Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program / Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2028	Optimalisasi peran operator desa, penguatan kemitraan lintas sektor, dan pemanfaatan data kependudukan	Integrasi dan sinergi layanan administrasi kependudukan	Kerja sama pelayanan dan pelayanan jemput bola terintegrasi	Desa/kelurahan dengan cakupan dokumen rendah dan wilayah, sekolah, kecamatan se kabupaten Lampung Barat	Program Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil, Fasilitas terkait Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Tahun 2029	Pemanfaatan SDM lintas sektor	Afirmasi dan pemerataan pelayanan bagi penduduk rentan	Pelayanan administrasi kependudukan bagi lansia, penyandang disabilitas, Pelayanan Jemput bola	Desa/kelurahan dengan cakupan dokumen rendah dan wilayah, sekolah, kecamatan se kabupaten Lampung Barat	Program Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil, Fasilitas terkait Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program / Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2030	Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia, inovasi pelayanan, dan penguatan sistem keberlanjutan	Pemantapan, inovasi, dan keberlanjutan pelayanan	Konsolidasi capaian dan peningkatan kualitas serta keberlanjutan layanan	Desa/kelurahan dengan cakupan dokumen rendah dan wilayah, sekolah, kecamatan se kabupaten Lampung Barat	Program Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil, Fasilitas terkait Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 2 (Meningkatnya stakeholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama) adalah :
 1. Mengidentifikasi instansi pemerintah, swasta, BUMN, organisasi masyarakat, dan lembaga lain yang relevan untuk menjalin kerja sama.
 2. Melakukan sosialisasi, audiensi, forum diskusi, dan pendekatan intensif untuk membangun hubungan baik dengan calon mitra kerja sama.
 3. Menyusun format perjanjian kerja sama (PKS) yang fleksibel, mudah dipahami, dan cepat dalam proses administrasinya.

Adapun tahapan strategi 2 selama 5 tahun kedepan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.6
Tahapan Strategi Sasaran Strategis 2 s.d. tahun 2030

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2026	Optimalisasi SDM, pemanfaatan data kelembagaan, serta dukungan anggaran koordinasi	Identifikasi, sosialisasi awal, dan realisasi kerja sama tahap awal	Pemetaan calon mitra dan penandatanganan PKS prioritas	Instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD strategis, Instansi vertikal dan swasta	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajiandatabase kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , , Penyusunan Profil Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Tahun 2027	Pemanfaatan SDM lintas bidang, sarana komunikasi, dan dukungan anggaran audiensi	Pendekatan intensif dan perluasan kerja sama	Penambahan jumlah mitra dan peningkatan cakupan layanan melalui PKS	Instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD strategis, Instansi vertikal dan swasta	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajiandatabase kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , , Penyusunan Profil Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2028	Optimalisasi tim teknis , pemanfaatan regulasi dan SOP PKS	Standardisasi PKS dan realisasi kerja sama berkelanjutan	Penyederhanaan format PKS dan peningkatan efisiensi proses administrasi	Instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD strategis, Instansi vertikal dan swasta	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajiandatabase kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , , Penyusunan Profil Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Tahun 2029	Optimalisasi SDM monitoring, sistem dokumentasi, dan evaluasi kerja sama	Penguatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama	Peningkatan kualitas implementasi PKS dan replikasi kerja sama berhasil	Instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD strategis, Instansi vertikal dan swasta	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajiandatabase kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , , Penyusunan Profil Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Tahun Ke	Optimalisasi Sumber Daya	Tahapan	Fokus	Lokus	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tahun 2030	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi, evaluasi kinerja, dan inovasi kemitraan	Pemantapan dan pengembangan kerja sama	Konsolidasi seluruh PKS dan penguatan kemitraan jangka panjang	Instansi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD strategis, Instansi vertikal dan swasta	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajiandatabase kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , , Penyusunan Profil Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

3.1 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

- Kebijakan dalam Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (sasaran 1) antara lain :
 1. Optimalisasi pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi untuk memperluas cakupan layanan.
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur di bidang administrasi kependudukan.
 3. Penerapan sistem jemput bola di lokasi strategis dan wilayah sulit akses.
- Kebijakan dalam mewujudkan Meningkatkan stakeholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama) adalah sebagai berikut :
 1. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperluas jejaring kerja sama pelayanan publik.
 2. Fasilitasi dan percepatan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan negosiasi dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 4. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi kerja sama untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan kerja sama.
 5. Integrasi pelayanan melalui kerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program, kegiatan serta penjabaran yang lebih detail yaitu dalam sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Langkah-langkah operasional tersebut harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan kinerja organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.1 Uraian Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program beserta indikator kinerja masing-masing program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya program yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Program yang dilaksanakan pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak enam program termasuk 1 program untuk operasional rutin kantor, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029 yang meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja barang dan jasa rutin kantor.

Indikator capai program ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan cerminan dari akuntabilitas dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 80,20 poin
- Tahun 2027 : 80,25 poin
- Tahun 2028 : 80,30 poin
- Tahun 2029 : 80,35 poin

- Tahun 2030 : 80,40 poin

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencatat dan mendokumentasikan data perseorangan setiap penduduk secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan. Program ini merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan dan bertujuan untuk menjamin hak-hak sipil warga negara, menyediakan data kependudukan yang akurat, serta mendukung perencanaan pembangunan.

Indikator capaian program ini adalah :

1) Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :

- Tahun 2026 : 3,16 %
- Tahun 2027 : 3,38 %
- Tahun 2028 : 3,61 %
- Tahun 2029 : 3,83 %
- Tahun 2030 : 4,06 %

2) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas anak

Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :

- Tahun 2026 : 81,70%
- Tahun 2027 : 81,80%
- Tahun 2028 : 81,90%
- Tahun 2029 : 82%
- Tahun 2030 : 82,10%

3. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Peristiwa ini meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan nama atau status kewarganegaraan, yang dituangkan dalam dokumen resmi berupa akta pencatatan sipil.

Indikator capaian program ini adalah

1) Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :

- Tahun 2026 : 100 %
- Tahun 2027 : 100 %
- Tahun 2028 : 100 %
- Tahun 2029 : 100 %
- Tahun 2030 : 100 %

- 2) Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :
 - Tahun 2026 : 100%
 - Tahun 2027 : 100%
 - Tahun 2028 : 100%
 - Tahun 2029 : 100%
 - Tahun 2030 : 100%
- 3) Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :
 - Tahun 2026 : 100%
 - Tahun 2027 : 100%
 - Tahun 2028 : 100%
 - Tahun 2029 : 100%
 - Tahun 2030 : 100%
- 4) Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :
 - Tahun 2026 : 100%
 - Tahun 2027 : 100%
 - Tahun 2028 : 100%
 - Tahun 2029 : 100%
 - Tahun 2030 : 100%

4. Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah proses perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, pemutakhiran, pengamanan, pemanfaatan, dan penyebarluasan data serta informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Informasi ini mencakup data peristiwa penting yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.

Indikator capain program ini adalah

- 1) Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan
Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :
 - Tahun 2026 : 63%
 - Tahun 2027 : 73%
 - Tahun 2028 : 81%
 - Tahun 2029 : 90 %
 - Tahun 2030 : 100 %
- 2) Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti
Dengan target capaian Renstra selama 5 tahun :
 - Tahun 2026 : 100%
 - Tahun 2027 : 100%

- Tahun 2028 : 100%
- Tahun 2029 : 100%
- Tahun 2030 : 100%

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang bertujuan untuk mengelola, menyusun, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi mengenai kondisi kependudukan di suatu wilayah. Program ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat.

Indikator capaian program ini adalah “Meningkatnya kualitas profil kependudukan”

Dengan Target capaian Renstra selama 5 Tahun :

- Tahun 2026 : 100%
- Tahun 2027 : 100%
- Tahun 2028 : 100%
- Tahun 2029 : 100%
- Tahun 2030 : 100%

Tabel 4.1
Sasaran Dan Indikator Sasaran serta Formulasi Perhitungan Target Untuk Kepala Bidang
(Eselon III)

Nama Bidang	Nama Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target					Perangkat Daerah
					2026	2027	2028	2029	2030	
Sekretariat	Program Penunjang urusan Pemerintah Kab/kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	80,20%	80,25%	80,30%	80,35%	80,40%	Disdukcapi
Bidang pelayanan Pendaftaran penduduk	Program pelayanan Pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	$\frac{\text{Jumlah Aktivasi IKD}}{\text{jumlah wajib KTP yang sudah rekam}} \times 100\%$	3,16%	3,38%	3,61%	3,83%	4,06%	Disdukcapi
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak	$\frac{\text{Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\text{jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun}} \times 100\%$	81,70	81,80	81,90	82	82,10	Disdukcapi
Bidang Pelayanan Pencatatan sipil	Program pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{jumlah orang yang melaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapi
			Persentase akta kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{jumlah orang yang melaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapi
			Persentase akta perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{jumlah orang yang melaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapi
			Persentase akta perceraian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{jumlah orang yang melaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapi
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan PDIP	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Permintaan Informasi Kependudukan yang dilayan}}{\text{Jumlah total informasi kependudukan yang tersedia}} \times 100\%$	40%	50%	63%	81%	100%	Disdukcapi
			Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan perjanjian kerjasama}}{\text{jumlah pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapi
Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Terwujudnya profil perkembangan kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Data Profil Kependudukan Kab. Lampung Barat}}{\text{jumlah Data Profil berdasarkan Permendagri No 65 Tahun 2010}} \times 100\%$	75%	78,57%	82%	85,71%	89,28%	Disdukcapi

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi serta untuk mengukur keberhasilan suatu program, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak 17 kegiatan termasuk 8 kegiatan rutin untuk operasional rutin kantor, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program rutin yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan dokumen anggaran perangkat daerah dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang pengalokasian anggarannya diperuntukan dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang bertugas dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat serta pembiayaan untuk kegiatan penyusunan laporan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan evaluasi kinerja pegawai dan pembiayaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang bertugas dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan untuk penyediaan peralatan penerangan gedung kantor, pengadaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan, penyediaan menu jamuan untuk tamu kantor dan penyediaan biaya untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka penyediaan barang peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kegiatan operasional pelayanan perangkat daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka membayar layanan jasa kantor meliputi kegiatan administrasi surat menyurat dan pembiayaan penyediaan barang dan jasa untuk keperluan kantor antara lain layanan jasa telekomunikasi, air dan listrik serta penyediaan peralatan kantor lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lapung Barat.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas serta peralatan dan perlengkapan kantor yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lapung Barat.
- 2) Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pendaftaran Penduduk adalah sebagai :
- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kegiatan ini merupakan bagian inti dari urusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil. Kegiatan ini mencakup seluruh proses pencatatan data dan peristiwa penting yang terkait Pendaftaran Penduduk.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kegiatan ini terdiri dari fasilitasi pendaftaran penduduk, dan sosialisasi pendaftaran penduduk.
- 3) Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pencatatan Sipil adalah sebagai :
- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan menerbitkan dokumen kependudukan resmi sebagai bukti hukum.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini meliputi Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil dan Fasilitasi terkait pencatatan sipil
 - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini meliputi Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
- 4) Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan adalah sebagai :
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi
- 5) Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Profil Kependudukan adalah sebagai berikut :
- a. Penyusunan Profil Kependudukan
Kegiatan ini meliputi proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kependudukan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan dinamika penduduk

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak 49 sub kegiatan termasuk 30 kegiatan rutin untuk operasional rutin kantor.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator dan pagu indikatif adalah sebagaimana tabel berikut :

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,20%	3.921.704.496	80,25%	4.362.007.046	80,30%	4.771.207.750	80,35%	5.221.328.525	80,40%	5.716.461.378
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.853.000		46.038.300		50.642.130		55.706.343		61.276.977
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Doku men	27.130.000	1 Doku men	29.843.000	8 Doku men	32.827.300	1 Doku men	36.110.030	8 Doku men	39.721.033
	Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun	5 Doku men	7.130.000	5 Doku men	7.843.000	5 Doku men	8.627.300	5 Doku men	9.490.030	5 Doku men	10.439.033
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapo r 2 an	7.593.000	1 Lapo r 2 an	8.352.300	1 Lapo r 2 an	9.187.530	1 Lapo r 2 an	10.106.283	1 Lapo r 2 an	11.116.911
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Doku men	27.130.000	1 Doku men	29.843.000	8 Doku men	32.827.300	1 Doku men	36.110.030	8 Doku men	39.721.033
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Doku men	1.250.000	1 Doku men	1.375.000	1 Doku men	1.512.500	1 Doku men	1.663.750	1 Doku men	1.830.125
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD	1 Doku men	900.000	1 Doku men	990.000	1 Doku men	1.089.000	1 Doku men	1.197.900	1 Doku men	1.317.690
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Doku men	1.200.000	1 Doku men	1.320.000	1 Doku men	1.452.000	1 Doku men	1.597.200	1 Doku men	1.756.920

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	1.000.0 00	1 Doku men	1.100.0 00	1 Dokum en	1.210. 000	1 Doku men	1.331.00 0	1 Doku men	1.464.10 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Doku men	2.780.0 00	1 Doku men	3.058.0 00	1 Dokum en	3.363. 800	1 Doku men	3.700.18 0	1 Doku men	4.070.19 8
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Doku 2 men	7.593.0 00	1 Doku 2 men	8.352.3 00	1 Dokum 2 en	9.187. 530	1 Doku 2 men	10.106.2 83	1 Doku 2 men	11.116.9 11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.085.7 56.596		3.394.3 32.256		3.733. 765.48 1		4.107.14 2.029		4.517.85 6.232
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2 8 orang	3.080.2 56.596	2 8 orang	3.388.2 82.256	2 8 orang	3.727. 110.48 1	2 8 orang	4.099.82 1.529	2 8 orang	4.509.80 3.682
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Doku men	2.500.0 00	1 Doku men	2.750.0 00	1 Dokum en	3.025. 000	1 Doku men	3.327.50 0	1 Doku men	3.660.25 0
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Doku men	1.000.0 00	2 Doku men	1.100.0 00	2 Dokum en	1.210. 000	2 Doku men	1.331.00 0	2 Doku men	1.464.10 0

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	2 Doku men	2.000.0 00	2 Doku men	2.200.0 00	2 Dokum en	2.420. 000	2 Doku men	2.662.00 0	2 Doku men	2.928.20 0
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2 8 ASN	3.080.2 56.596	2 8 ASN	3.388.2 82.256	2 8 ASN	3.727. 110.48 1	2 8 ASN	4.099.82 1.529	2 8 ASN	4.509.80 3.682
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Doku men	2.500.0 00	1 Doku men	2.750.0 00	1 Dokum en	3.025. 000	1 Doku men	3.327.50 0	1 Doku men	3.660.25 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Doku men	1.000.0 00	2 Doku men	1.100.0 00	2 Dokum en	1.210. 000	2 Doku men	1.331.00 0	2 Doku men	1.464.10 0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Doku men	2.000.0 00	2 Doku men	2.200.0 00	2 Dokum en	2.420. 000	2 Doku men	2.662.00 0	2 Doku men	2.928.20 0
Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	1 Doku men	7.937.0 00	1 Doku men	8.730.7 00	1 Dokum en	9.603. 770	1 Doku men	10.564.1 47	1 Doku men	11.620.5 62
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	1 Doku men	7.937.0 00	1 Doku men	8.730.7 00	1 Dokum en	9.603. 770	1 Doku men	10.564.1 47	1 Doku men	11.620.5 62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.628. 000		56.490. 800		62.139 .880		68.353.8 68		75.189.2 55

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku men	8.628.0 00	1 Doku men	9.490.8 00	1 Dokum en	10.439 .880	1 Doku men	11.483.8 68	1 Doku men	12.632.2 55
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000. 000	4 Oran g	22.000. 000	4 Orang	24.200 .000	4 Oran g	26.620.0 00	4 Oran g	29.282.0 00
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	3 0 Orang		3 Oran g	25.000. 000	3 0 Orang	27.500 .000	3 Oran g	30.250.0 00	3 Oran g	33.275.0 00
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku men	8.628.0 00	1 Doku men	9.490.8 00	1 Dokum en	10.439 .880	1 Doku men	11.483.8 68	1 Doku men	12.632.2 55
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000. 000	4 Oran g	22.000. 000	4 Orang	24.200 .000	4 Oran g	26.620.0 00	4 Oran g	29.282.0 00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 0 Orang		3 Oran g	25.000. 000	3 0 Orang	27.500 .000	3 Oran g	30.250.0 00	3 Oran g	33.275.0 00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			303.400 .000		316.872 .100		321.55 9.310		326.715. 241		332.386. 765
	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	3.633.0 00	1 paket	3.996.3 00	1 paket	4.395. 930	1 paket	4.835.52 3	1 paket	5.319.07 5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 paket	30.050. 000	1 paket	33.055. 000	1 paket	36.360 .500	1 paket	39.996.5 50	1 paket	43.996.2 05

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 Doku men	3.960.0 00	4 Doku men	4.356.0 00	4 Dokum en	4.791. 600	4 Doku men	5.270.76 0	4 Doku men	5.797.83 6
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lapora n	4.968.0 00	1 Lapor an	5.464.8 00	1 laporan	6.011. 280	1 lapor an	6.612.40 8	1 lapor an	7.273.64 9
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lapora n	260.789 .000	1 Lapor an	270.000 .000	1 laporan	270.00 0.000	1 lapor an	270.000. 000	1 lapor an	270.000. 000
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	3.633.0 00	1 paket	3.996.3 00	1 paket	4.395. 930	1 paket	4.835.52 3	1 paket	5.319.07 5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 paket	30.050. 000	1 paket	33.055. 000	1 paket	36.360 .500	1 paket	39.996.5 50	1 paket	43.996.2 05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 Doku men	3.96000 0	4 Doku men	4.356.0 00	4 Dokum en	4.791. 600	4 Doku men	5.270.76 0	4 Doku men	5.797.83 6
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lapora n	4.968.0 00	1 Lapor an	5.464.8 00	1 laporan	6.011. 280	1 lapor an	6.612.40 8	1 lapor an	7.273.64 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lapora n	260.789 .000	1 Lapor an	270.000 .000	1 laporan	270.00 0.000	1 lapor an	270.000. 000	1 lapor an	270.000. 000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 1 unit	185.950 .000	2 0 unit	224.545 .000	2 5 unit	246.99 9.500	2 5 unit	271.699. 450	2 5 unit	298.869. 395
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	6.000.0 00	1 unit	6.600.0 00	1 5 unit	7.260. 000	1 5 unit	7.986.00 0	1 5 unit	8.784.60 0

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	179.950.000	10 unit	197.945.000	10 unit	217.739.500	10 unit	239.513.450	10 unit	263.464.795
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	2 unit	26.620.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.513.400		103.964.740		114.361.214		125.797.335		138.377.069
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	1 Laporan	2.200.000	1 laporan	2.420.000	1 laporan	2.662.000	1 laporan	2.928.200
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.535.000	1 Laporan	48.988.500	1 laporan	53.887.350	1 laporan	59.276.085	1 laporan	65.203.694
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	47.978.400	1 Laporan	52.776.240	1 laporan	58.053.864	1 laporan	63.859.250	1 laporan	70.245.175
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	1 Laporan	2.200.000	1 laporan	2.420.000	1 laporan	2.662.000	1 laporan	2.928.200
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.535.000	1 Laporan	48.988.500	1 laporan	53.887.350	1 laporan	59.276.085	1 laporan	65.203.694
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	47.978.400	1 Laporan	52.776.240	1 laporan	58.053.864	1 laporan	63.859.250	1 laporan	70.245.175
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 unit	143.060.000	10 unit	177.366.000	10 unit	195.102.600	10 unit	214.612.860	10 unit	236.074.146

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	106.050.000	4 unit	116.655.000	4 unit	128.320.500	4 unit	141.152.550	4 unit	155.267.805
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	9.510.000	3 unit	10.461.000	3 unit	11.507.100	3 unit	12.657.810	3 unit	13.923.591
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	27.500.000	1 unit	30.250.000	1 unit	33.275.000	1 unit	36.602.500	1 unit	40.262.750
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 unit		2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	2 unit	26.620.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	3,17%	554.442.000	3,38%	653.611.200	3,61%	718.972.320	3,81%	790.869.552	4,06%	869.956.507
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	81,70%		81,80%		81,90%		82,00%		82,10%	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	112.527.000	1 Dokumen	123.779.700	1 Dokumen	136.157.670	1 Dokumen	149.773.437	1 Dokumen	164.750.781
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan	310.250.000	1 Laporan	341.275.000	1 laporan	375.402.500	1 laporan	412.942.750	1 laporan	454.237.025
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 laporan	49.700.000	2 Laporan	54.670.000	2 laporan	60.137.000	2 laporan	66.150.700	2 laporan	72.765.770

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Doku men	112.527 .000	1 Doku men	123.779 .700	1 Dokum en	136.15 7.670	1 Dokum en	149.773. 437	1 Doku men	164.750. 781
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 lapora n	310.250 .000	1 Lapor an	341.275 .000	1 laporan	375.40 2.500	1 lapora n	412.942. 750	1 lapora n	454.237. 025
Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 lapora n	49.700. 000	2 Lapor an	54.670. 000	2 laporan	60.137 .000	2 lapora n	66.150.7 00	2 lapora n	72.765.7 70
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	1 lapora n	81.965. 000	1 Lapor an	90.161. 500	1 laporan	99.177 .650	1 lapora n	109.095. 415	1 lapora n	120.004. 957
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 lapora n	-	1 Lapor an	20.000. 000	1 laporan	22.000 .000	1 lapora n	24.200.0 00	1 lapora n	26.620.0 00
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	1 lapora n	81.965. 000	1 Lapor an	90.161. 500	1 laporan	99.177 .650	1 lapora n	109.095. 415	1 lapora n	120.004. 957
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 lapora n		1 Lapor an	20.000. 000	1 laporan	22.000 .000	1 lapora n	24.200.0 00	1 lapora n	26.620.0 00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	100%	155.199 .500	100%	198.719 .450	100%	218.59 1.395	100%	240.450. 535	100%	264.495. 588
	Persentase akta kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase akta perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase akta perceraian yang di terbitkan bagi yang melaporkan	100%		100%		100%		100%		100%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 layan an	65.042. 000	3 Layan an	71.546. 200	3 layana n	78.700 .820	3 layana n	86.570.9 02	3 layana n	95.227.9 92
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layan an	65.042. 000	3 Layan an	71.546. 200	3 layana n	78.700 .820	3 layana n	86.570.9 02	3 layana n	95.227.9 92
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Lapor an	-	1 Lapor an	28.000. 000	1 Lapura n	30.800 .000	1 Lapura n	33.880.0 00	1 Lapor an	37.268.0 00
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Lapor an	27.084. 000	1 Lapor an	29.792. 400	1 Lapura n	32.771 .640	1 Lapura n	36.048.8 04	1 Lapor an	39.653.6 84
Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Lapor an		Lapor an	28.000. 000	Lapura n	30.800 .000	Lapura n	33.880.0 00	Lapor an	37.268.0 00
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Lapor an	27.084. 000	1 Lapor an	29.792. 400	1 Lapura n	32.771 .640	1 Lapura n	36.048.8 04	1 Lapor an	39.653.6 84
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	1 Lapor an	63.073. 500	1 Lapor an	69.380. 850	1 Lapura n	76.318 .935	1 Lapura n	83.950.8 29	1 Lapor an	92.345.9 11
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil	1 Lapor an	63.073. 500	1 Lapor an	69.380. 850	1 Lapor an	76.318 .935	1 Lapo ran	83.950.8 29	1 Lapor an	92.345.9 11

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	40%	583.330.000	50%	696.663.000	63%	766.329.300	81%	842.962.230	100%	927.258.453
	Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 doku men	488.870.000	1 doku men	537.757.000	1 doku men	591.532.700	1 doku men	650.685.970	1 doku men	715.754.567
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 doku men	40.568.000	3 doku men	44.624.800	3 doku men	49.087.280	3 doku men	53.996.008	3 doku men	59.395.609
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	1 doku men	488.870.000	1 Doku men	537.757.000	1 doku men	591.532.700	1 doku men	650.685.970	1 doku men	715.754.567
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 doku men	40.568.000	1 Doku men	44.624.800	1 doku men	49.087.280	1 doku men	53.996.008	1 doku men	59.395.609
Penyelenggaraan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 lapor an	-	1 Lapor an	30.000.000	1 lapora n	33.000.000	1 lapor an	36.300.000	1 lapor an	39.930.000
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 lapor an	-	1 Lapor an	25.000.000	1 lapora n	27.500.000	1 lapor an	30.250.000	1 lapor an	33.275.000
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 lapor an	28.580.000	1 Lapor an	31.438.000	1 lapora n	34.581.800	1 lapor an	38.039.980	1 lapor an	41.843.978

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Lapo ran		1 Lapo ran	30.000. 000	1 Lapo ran	33.000 .000	1 Lapo ran	36.300.0 00	1 Lapo ran	39.930.0 00
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Lapo ran		1 Lapo ran	25.000. 000	1 Lapo ran	27.500 .000	1 Lapo ran	30.250.0 00	1 Lapo ran	33.275.0 00
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Lapo ran	28.580. 000	1 Lapo ran	31.438. 000	1 Lapo ran	34.581 .800	1 Lapo ran	38.039.9 80	1 Lapo ran	41.843.9 78
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 lapor an	25.312. 000	1 lapor an	27.843. 200	1 lapor an	30.627 .520	1 lapor an	33.690.2 72	1 lapor an	37.059.2 99
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 lapor an	25.312. 000	1 lapor an	27.843. 200	1 lapor an	30.627 .520	1 lapor an	33.690.2 72	1 lapor an	37.059.2 99
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	75%	30.721. 900	78,57%	33.794. 090	82%	37.173 .499	85,71%	40.890.8 49	89,28%	44.979.9 34
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 doku men	30.721. 900	1 doku men	33.794. 090	1 doku men	37.173 .499	1 doku men	40.890.8 49	1 doku men	44.979.9 34
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 doku men	30.721. 900	1 doku men	33.794. 090	1 doku men	37.173 .499	1 doku men	40.890.8 49	1 doku men	44.979.9 34

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG			30.606. 500		33.667. 150		37.033 .865		40.737.2 52		44.810.9 77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 Paket	3.600.0 00	1 Paket	3.960.0 00	1 Pak et	4.356. 000	1 Pak et	4.791.60 0	1 Pake t	5.270.76 0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 Pake t	3.600.0 00	1 Paket	3.960.0 00	1 Pak et	4.356. 000	1 Pak et	4.791.60 0	1 Pake t	5.270.76 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	11.250. 000	1 Lapo ran	12.375. 000	1 Lapo ran	13.612 .500	1 Lap oran	14.973.7 50	1 Lapo ran	16.471.1 25
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	15.756. 500	1 Lapo ran	17.332. 150	1 Lapo ran	19.065 .365	1 Lap oran	20.971.9 02	1 Lapo ran	23.069.0 92
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	11.250. 000	1 Lapo ran	12.375. 000	1 Lapo ran	13.612 .500	1 Lap oran	14.973.7 50	1 Lapo ran	16.471.1 25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	15.756. 500	1 Lapo ran	17.332. 150	1 Lapo ran	19.065 .365	1 Lap oran	20.971.9 02	1 Lapo ran	23.069.0 92
JUMLAH		5.245.397.896		5.852.162.686		6.437.378.954		7.081.116.850		7.789.228.534	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 tidak terdapat sub kegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dimungkinkan karena saat ini prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berfokus pada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, pengembangan pariwisata, pemantapan infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Disamping itu sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat lebih bersifat rutin dan administratif, seperti fasilitasi ormas, pembinaan ideologi Pancasila, deteksi dini potensi konflik, serta pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Meskipun penting dalam konteks ketahanan ideologi dan stabilitas sosial-politik daerah, kegiatan tersebut belum diarahkan secara strategis untuk mendorong pencapaian target prioritas pembangunan daerah secara langsung.

Kedepan, diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih mendukung prioritas pembangunan daerah, antara lain melalui peningkatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menciptakan Masyarakat tertib administrasi kependudukan.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Bidang urusan yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator rencana strategis dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan dalam rencana strategis ini merupakan indikator yang telah ditetapkan melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan rencana strategis. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efesiensi	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	$\frac{\text{Persentase Cupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA + Akta Kelurahan)}}{2} \times 100\%$	68,7 3%	69,2 6%	69,7 7%	70,3 0%	70,8 3%
	Meningkatnya Stakholder yang melakukan Kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	Persentase Jumlah Stakholder yang melakukan Kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah Kerjasama yang menjadi target s. d tahun 2030}} \times 100\%$	42,8 6%	57,1 4%	71,4 3%	85,7 1%	100 %

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta pemenuhan hak-hak dasar penduduk, ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama dalam pencapaian target kinerja selama periode 2025–2029. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) dan uraian target kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)

Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP elektronik

Uraian Target Kinerja :

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan cakupan perekaman KTP-el bagi seluruh penduduk wajib KTP (usia ≥17 tahun atau yang telah/pernah menikah).

Target perekaman ditujukan untuk:

- Menjamin kepemilikan identitas tunggal berbasis NIK
- Mendukung integrasi pelayanan publik berbasis digital
- Menunjang validitas data dalam Pemilu, BPJS, bantuan sosial, dll.

Target selama 5 Tahun :

- Tahun 2026 : 223.293
- Tahun 2027 : 224.293
- Tahun 2028 : 225.293
- Tahun 2029 : 226.293
- Tahun 2030 : 227.293

2. Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA

Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Uraian Target Kinerja:

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan bentuk identitas resmi bagi anak dan bagian dari perlindungan hak sipil anak. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan penerbitan KIA sebagai:

- Alat identifikasi anak
- Dasar integrasi layanan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
- Penguatan budaya sadar administrasi kependudukan sejak dini

Target selama 5 Tahun :

- Tahun 2026 : 81,70%
- Tahun 2027 : 81,80%
- Tahun 2028 : 81,90%
- Tahun 2029 : 82%
- Tahun 2030 : 82,10%

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan yang memiliki akta kelahiran

Uraian Target Kinerja:

Kepemilikan akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan hukum atas status kewarganegaraan, serta menjadi dasar dalam memperoleh dokumen kependudukan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui:

- Pelayanan langsung dan jemput bola
- Kerja sama dengan rumah sakit, bidan, dan desa
- Pelayanan terintegrasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan

Target selama 5 Tahun :

- Tahun 2026 : 55,77%
- Tahun 2027 : 56,73%
- Tahun 2028 : 57,65%
- Tahun 2029 : 58,61%
- Tahun 2030 : 59,57%

Dari ke-3 Indikator Kinerja Kunci tersebut dapat digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029

Urusan	IKK	TARGET IKK TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota	Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)	223.293	224.293	225.293	226.293	227.293
	Persentase Anak Usia 0–17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA	81,70%	81,80%	81,90%	82%	82,10%
	Kepemilikan Akta Kelahiran	55,77%	56,73%	57,65%	58,61%	59,57%

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 pendukung stunting

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam mendukung upaya penanggulangan stunting melalui penerbitan dokumen kependudukan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 1–17 tahun.

Kepemilikan akta kelahiran memastikan setiap anak tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan, sehingga berhak memperoleh berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Hal ini menjadi fondasi penting dalam intervensi pencegahan stunting, karena anak yang terdata dapat lebih mudah diakses oleh program-program kesehatan ibu dan anak, bantuan gizi, serta jaminan sosial.

Sementara itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak hanya menjadi bukti identitas resmi, tetapi juga memberikan kemudahan akses anak dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya KIA, pemerintah daerah dapat lebih efektif melakukan pendataan, pemantauan, dan penyaluran program intervensi stunting sesuai kelompok usia anak.

Dengan demikian, melalui layanan penerbitan akta kelahiran dan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mendukung percepatan penurunan stunting, memastikan setiap anak memiliki hak identitas hukum, serta menjamin akses mereka terhadap pelayanan dasar yang esensial bagi tumbuh kembang yang sehat.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung percepatan penurunan stunting, ditetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029 yang diarahkan pada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan anak. Fokus utama ditujukan pada optimalisasi penerbitan Akte Kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–17 tahun sebagai dasar pemenuhan hak sipil sekaligus akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Adapun rencana target capaian kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Capaian Kinerja Pendukung Stunting

Uraian	TARGET				
	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	81,60	81,70%	81,80%	81,90%	82%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat, serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini mampu menjawab berbagai tantangan, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Renstra ini juga menjadi alat kendali manajerial dan evaluatif bagi internal organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran aparatur serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait.

Akhir kata, dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh elemen dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

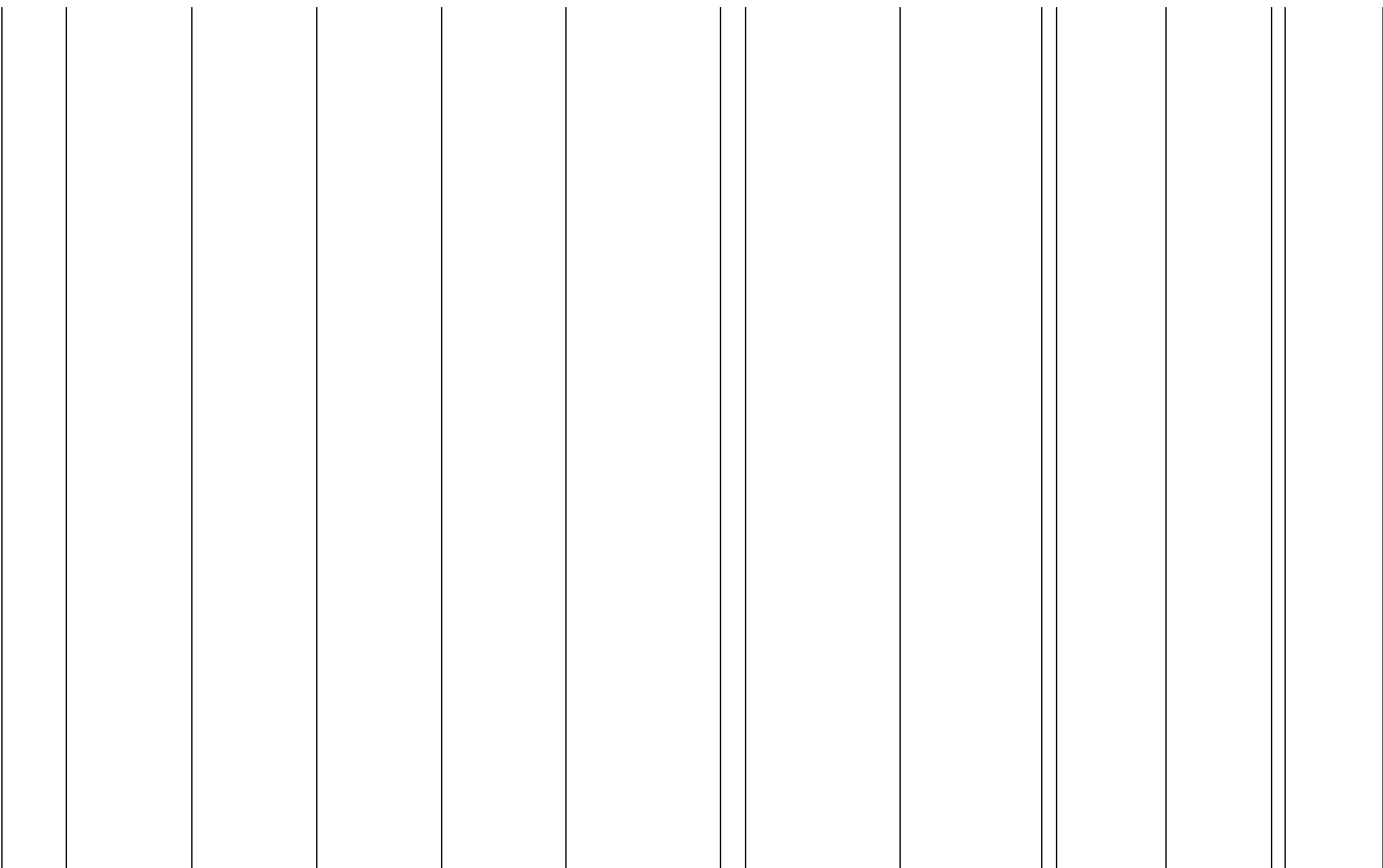


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

Visi
RPJMD 2025-2029
"LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA"

ASPEK	Visi : KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN	Indikator	Visi RPJMD 2025-2029 : Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata (HEBAT DAN SETIA)		Misi	Tujuan		Indikator	Sasaran		Ultimate Outcome (Tujuan OPD)	
	Sasaran Visi RPJPD 2025-2045		Sasaran Visi	Indikator	RPJMD 2025-2029		RPJMD 2025-2029		RPJMD 2025-2029	Indikator		
SDM	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	1	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)				Indeks pembangunan olahraga				
		Rasio gini (Indeks)		Rasio gini (Indeks)								
		Persentase Desa Mandiri (%)		Persentase Desa Mandiri (%)								



[illegible]

[illegible]

					Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	2 Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	2 Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya daerah
						3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (angka Provinsi)?? Indeks Kerukunan Hidup umat beragama Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	5 Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) Tingkat kriminalitas Indeks Kerukunan Hidup umat beragama Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat
Ekonomi	Peningkatan Pendapatan Perkapita	PDRB per kapita (Rp Juta) Pertumbuhan Ekonomi (%) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	Peningkatan Pendapatan perkapita	PDRB per kapita (Rp Juta) Pertumbuhan Ekonomi (%) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	6 Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	PDRB per kapita (Rp Juta) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%) Tingkat Inflasi (%)	Meningkatnya kontribusi Sektor Perikanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya kontribusi Sektor Peternakan Dalam Pertumbuhan Ekonomi
						Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	PDRB per kapita (Rp Juta)			

[illegible]

[illegible]

												Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
												Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
												Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
												Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif dan akuntabel

[illegible]

													Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
	Infrastruktur					Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana	Indeks layanan infrastruktur daerah,	9	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

[illegible]

							Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya
Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	11	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator	Intermediate Outcome (Sasaran OPD)	Indikator	Intermediate Outcome (Sasaran Program OPD)	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Kegiatan	OPD		Indikator	Penempatan Indikator			
RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029													
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Meingkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	SDM Berakhlak	Bebas Stunting	Dinas Kesehatan	Kualitas kesehatan tinggi	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tujuan dan sasaran OPD Dinkes			
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Angka Kematian Bayi		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	SDM Berakhlak			Setiap Pekon 1 Pustu	Kesehatan Ibu dan Anak :	Tujuan dan sasaran OPD Dinkes		
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Menikatnya Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Ekonomi Gotong Royong			Penguatan SDM Kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Tujuan dan sasaran OPD Dinkes		
					Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Pemerintahan SMART			Layanan Publik, cepat murah	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Tujuan dan sasaran OPD Dinkes		
					Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi					Insidentil Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Program OPD Dinkes		
					Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	Program OPD Dinkes		
					Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan					Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Program OPD Dinkes		
					Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Program OPD Dinkes		
					Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji								
					Meningkatnya Pemenuhan Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan							Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	
												Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	
												Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	
												Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	
												Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	
												Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	
												Persentase penggunaan obat tradisional di Puskesmas	

	Keluarga Sehat Meningkat	Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan Persentase Institusi yang melaksanakan UKK Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AID Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam					Kualitas pendidikan tinggi dan merata	Hasil pembelajaran : Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*
--	--------------------------	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	---------------------------------------	---

Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa	Capaian nilai Rata-rata Literasi dan Numerasi hasil asesmen nasional	SDM Berakhlak	Seragam dan Tas Gratis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	i) Literasi Membaca (angka Provinsi)	Provinsi
			Meningkatnya manajerial kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah memiliki Predikat penilaian baik	SDM Berakhlak	Kerjasama Perguruan Tinggi (PT)		ii) Numerasi (angka Provinsi)	Provinsi
			Meningkatnya fungsi pengawas dan penilik	Persentase kebutuhan pengawas dengan satuan pendidikan				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional ...	
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APSPAUD)	Meningkatnya Sarana Pendidikan	Persentase terpenuhi media pendidikan				i) Literasi Membaca	Sasaran OPD Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	Meningkatnya prasarana Pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam kondisi Baik				ii) Numerasi	Sasaran OPD Pendidikan
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	Meningkatnya Layanan pendidikan terjangkau	Persentase angka putus sekolah				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tujuan OPD Pendidikan
Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang meningkat kapasitasnya			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tujuan OPD Pendidikan
		Persentase Peningkatan Atlit yang berprestasi	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Jumlah calon pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan calon pemuda kader				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	Tujuan OPD Pendidikan
			Meningkatkan Partisipasi Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (angka Provinsi)	Provinsi
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Olah Raga dalam Prestasi Olahraga	Jumlah organisasi yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menjadi berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	Sasaran RPJMD
			Meningkatnya partisipasi atlet dalam kejuaraan	Persentase Atlit yang Aktif mengikuti kejuaraan				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Industri
Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Bahan Bacaan di perpustakaan	Persentase peningkatan bahan bacaan di perpustakaan	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan		
		Persentase pemustaka yang mengakses informasi di perpustakaan	Meningkatnya kompetensi tenaga perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah tenaga perpustakaan yang meningkat kapasitasnya					
			Meningkatnya sarana Prasarana layanan perpustakaan di masyarakat	Persentase sarana prasarana perpustakaan yang sesuai standart					
			Meningkatnyafasilitasi pendirian perpustakaan	Persentase perpustakaan yang difasilitasi pembentukannya					
Indeks Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Kulitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	% Keluarga berkualitas	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Dinas KBPPPA	Kemandirian Penyangang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat	Sasaran Dinas sosial
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	meningkatnya pengarusutamaan gender	% ARG			Kehidupan beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Pengukuran Sampai Provinsi

IPA	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak	IPA	Meningkatkan layanan dukungan dan bantuan bagi korban kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan	% Perempuan mengalami kekerasan terlayanan					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Sasaran RPJMD
			Meningkatkan layanan dukungan dan bantuan bagi korban kekerasan dan pelecehan terhadap anak	% Anak mengalami kekerasan terlayani				Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	Tujuan KBPPPA
			Meningkatnya pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak					Indeks Perlindungan Anak	Sasaran KBPPPA
Total Fertility Rate	Meningkatnya Kepesertaan KB Pada PUS	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Meningkatnya pengguna KB pada Pasangan Usia Subur	mCPR, PA MIKUP, PB, Un meet Need	Ekonomi Gotong Royong	Penguatan SDM Kesehatan	Dinas KBPPPA		Indeks Pembangunan Pemuda	Provinsi, hitungan sampai provinsi
			Meningkatnya kebijakan perencanaan kependudukan	Pemanfaatan GDPK					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Sasaran KBPPPA
			Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan	MUKP , I Bangsa						
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	4 Meningkatkan kemandirian kesejahteraan sosial	% PPKS yang mandiri	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Ekonomi Gotong Royong	Kemiskinan turun	Dinas Sosial			
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor formal (%)		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor formal (%)	Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
: Persentase Penurunan PPKS			Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	% Taman makam pahlawan terkelola						
			Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	% Data tervalidasi						
			Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana						
			Meningkatkan kualitas layanan perlindungan kesejahteraan sosial	IKM dan Persentase Cakupan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial						
% Daerah Rawan Pangan	Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun			Dinas Ketahanan Pangan			
			Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten						
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan dengan Stabilitnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	CV. < 10 %	Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di kabupaten/kota						
Prevalensi Ketidaskukupan Konsumsi Pangan (%)			Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan	Infomasi Harga dan Pasokan Pangan						
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya pola konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Peningkatan pangankaragaman konsumsi pangan masyarakat.	Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi dan Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein						
	Atau meningkatkan kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat		Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan						

Nilai Produksi Tanaman pangan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya nilai tambah ternak Meningkatnya produktivitas Tanaman Pangan	Persentase peningkatan nilai tambah hasil ternak Persentase peningkatan produktivitas Tanaman Pangan	Ekonomi Gotong Royong	Penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana prasarana	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Sasaran RPJMD Tujuan Disnakerin
Nilai Produksi Hortikultura	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Produksi Hortikultura	Meningkatnya luas panen Tanaman Pangan Meningkatnya produktivitas Hortikultura	Persentase peningkatan luas panen Tanaman Pangan Persentase peningkatan produktivitas Hortikultura	Ekonomi Gotong Royong	Penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana prasarana	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat penguasaan IPTEK Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)	Tujuan BRIN
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Kualitas Daya tarik wisata	Persentase Pertumbuhan Destinasi wisata	Meningkatnya luas panen Hortikultura Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang memadai	Persentase peningkatan luas panen Hortikultura Persentase Destinasi wisata yang memadai			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Ekonomi hijau yang berkelanjutan Transformasi digital yang berkualitas	Setdakab Bag SDA Tujuan Dinas Kominfo
Rata-rata Lama Tinggal	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Cakupan promosi pariwisata				Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Sasaran RPJMD
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Meningkatnya Pengembangan Suber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kelompok sadar Wisata Persentase Produk Kreasi Unggulan Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	Ekonomi Gotong Royong	Rumah kreatif		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Sasaran Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
								Pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang tinggi	Sasaran RPJMD
PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Promosi bagi Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diberikan Fasilitas Promosi	Ekonomi Gotong Royong	Penanganan hulu hilir kopi robusta	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	Sasaran Dinas PUPR
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya				Persentase Desa Mandiri (%)	Sasaran DPMP
	Meningkatnya nilai produksi IKM Sektor Informal	Persentase peningkatan omset IKM sektor informal	Meningkatnya kapasitas IKM sektor informal	Persentase IKM sektor informal yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas					
PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	Ekonomi Gotong Royong	Penanganan hulu hilir kopi robusta	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan		
% Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	Meningkatnya Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak/retribusi baru	Pemerintahan SMART	Revitalisasi pasar	Badan Pendapatan Daerah		
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		Nilai tarif pajak/retribusi baru		Layanan Publik, cepat murah			
Nilai Realisasi Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah	Jumlah kerjasama dengan pelaku usaha/BUMD Jumlah aparaturnya pengelola pajak daerah yang berkompetensi					
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				Persentase Pelayanan Administrasi Pajak Daerah yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Pendapatan Daerah					
				Jumlah Sistem/laringan /Aplikasi dan Basis Data Pajak Daerah yang terpelihara					
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya penduduk angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan penduduk angkatan kerja yang bekerja	Meningkatnya tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kerja Meningkatnya Kompetensi dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pelayanannya Sistem/laringan /Aplikasi dan Basis Data Pajak Daerah yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah tenaga kerja terlatih Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Ekonomi Gotong Royong	Penurunan pengangguran melalui revitalisasi peranan BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		

		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase peningkatan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap perusahaan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Meningkatnya sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan norma ketenagakerjaan Meningkatnya sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan norma K3	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum terhadap norma Kerja Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum terhadap norma K3 Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja					
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja	Meningkatnya sarana hubungan industrial di perusahaan	Persentase perusahaan menengah dan besar yang membuat struktur skala upah Persentase perjanjian kerja Bersama (PKB) pada perusahaan besar dan menengah yang memiliki serikat pekerja/buruh Persentase keberadaan LKS Tripartit pada Kabupaten					
Persentase pertumbuhan Investasi PMDN/PMA		Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan Berbasis online	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Peningkatan Jumlah Investor IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Ekonomi Gotong Royong Pemerintahan SMART	Investasi Meningkat Layanan Publik, cepat murah		Dinas DPMPSTP	
Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal Yang Terpantau				Optimalisasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan berbasis teknologi					
		Meningkatnya iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Optimalisasi Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyusunan strategi dan pelaksanaan promosi penanaman moda					
% Koperasi yang Sehat		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saling Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Kompetensi Koperasi	Ekonomi Gotong Royong	UMKM, Koperasi dan Perdagangan tumbuh		Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
				Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah			
Persentase Peningkatan Jumlah UMKM Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saling UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	Meningkatnya Kompetensi SDM Usaha Mikro Meningkatnya Pemasaran Produk Usaha Mikro Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan E-Commerce Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (%)					
Indeks Reformasi Hukum		Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Meningkatnya kepatuhan PD dalam menyampaikan dokumen pelaporan	Persentase Pejabat Struktural yang menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tepat waktu			Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*	Sasaran Setdakab
Nilai evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)					Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKJIP tepat waktu Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen Rencana Aksi Persentase PD yang menyusun RKT tepat waktu Jumlah Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD Meningkatnya koordinasi pembentukan dan pembinaan BUMD dan BLUD		Setdakab Setdakab		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo

				Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perekonomian Daerah	Return on Aset (ROA) BUMD (%) Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi (4K) Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (%)	Beriman dan bertoleransi	Bantuan Matrbot, imam , guru ngaji, hafis quran, guru agama katholik dan kristen Umrah gratis dan pelayanan haji dan wisata rohani		
		Indeks Reformasi Hukum	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi, mineral dan Air	Persentase terlaksananya kebijakan energi , mineral dan air Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani Persentase Perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa Persentase peraturan perundangundangan yang dipublikasikan ke masyarakat Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM		Pembangunan masjid Bantuan rumah ibadah		
			Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
			Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah					
Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD		Set DPRD		Indeks Pelayanan Publik	Sasaran RPJMD
Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda		Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir				Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	Tujuan dan Sasaran Inspektorat
% Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan	Nilai SAKIP	Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan yang baik	Nilai SAKIP		Kecamatan	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah yang terjaga	Tingkat kriminalitas	Tujuan SatPOPP di SDM
IKM Pelayanan Kecamatan		% Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase Desa yang menetapkan dokumen APBDES, RKPDES, LPPDES tepat waktu umum Persentase Penyelesaian Dokumen Bidang Kesejahteraan Sosial Persentase Penyelesaian Dokumen UMMKM, Keagamaan, Lingkungan dan Kawasan Hijau Persentase Penyelesaian Dokumen RT/RW, Kependudukan, dan Pemerintahan				Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	Setdakab, Bag Hukum
% Desa Mandiri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tatakelola pemerintahan desa secara partisipatif	% Desa Mandiri	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat desa dalam memperdayakan masyarakat	% lembaga desa yang aktif	Ekonomi Gotong Royong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon	BUMDES Berdaya Saing	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Sasaran SatpolIPP
% Lembaga Ekonomi Desa yang Mandiri		% Lembaga Ekonomi Desa yang Mandiri	Meningkatnya tata kelola dan administrasi pemerintah desa	% Pekon tertib Administrasi	Pemerintahan SMART		Sinkronisasi APBD dengan Dana Desa	Indeks Demokrasi Indonesia	Pengukuran sampai dengan Provinsi

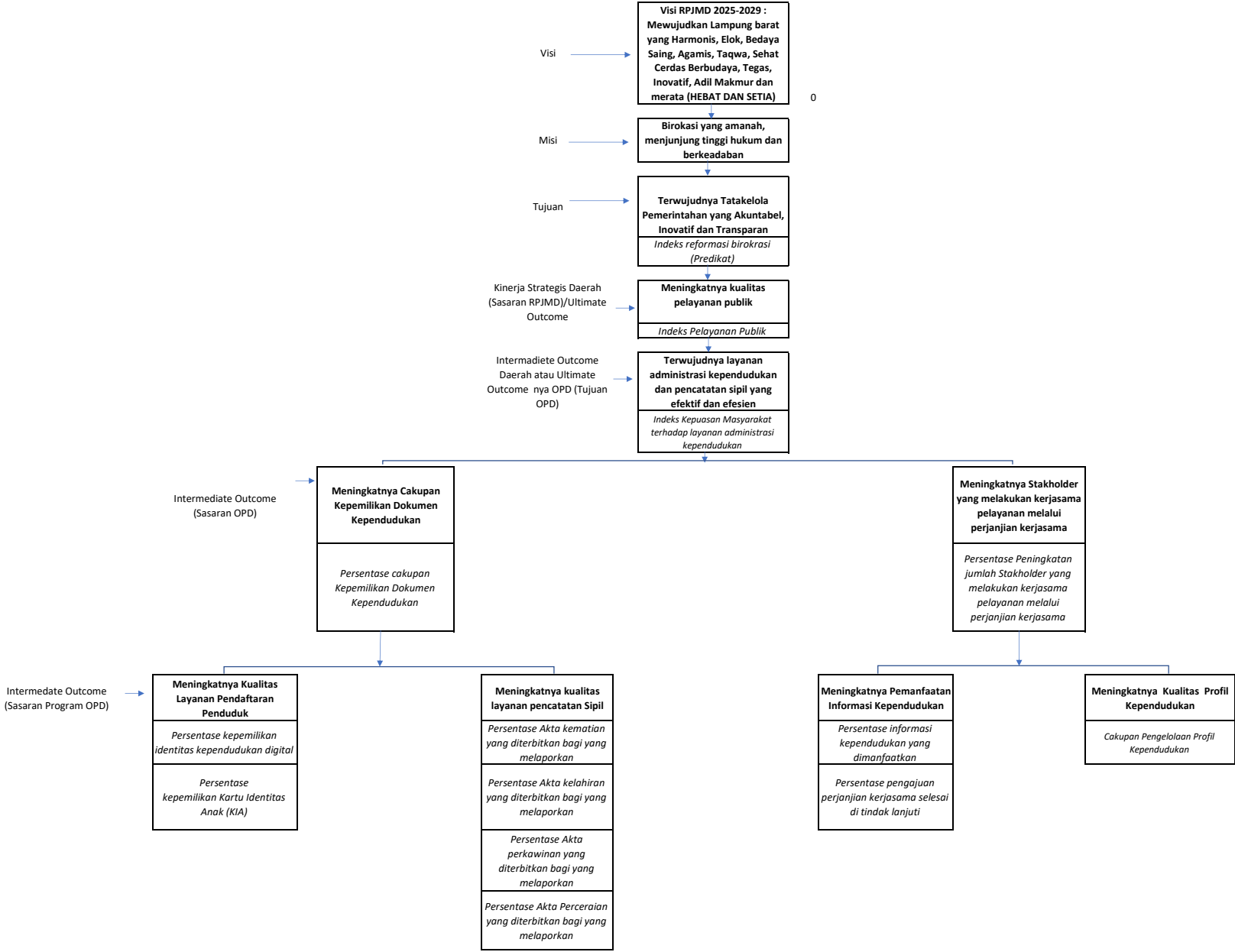
Opini BPK atas laporan keuangan	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu oleh Perangkat Daerah	Pemerintahan SMART	Sinkronisasi APBD dengan Dana Desa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah
Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan		Penetapan APBD tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian penatausahaan keuangan tepat waktu oleh Perangkat Daerah					Tingkat Inflasi (%)	Sasaran RPJMD (Ekonomi)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundangan	Meningkatnya Proses Pelaksanaan Pemanfaatan dan Mutasi Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengadaan dan Mutasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu oleh Perangkat Daerah					a. Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Program Dinas KUKMDA
	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang benar dan menggambarkan kekayaan daerah sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu				Daya saing daerah tinggi	Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (%)	Setdakab Tatakelola
Indeks Profesionalismen ASN	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Indeks Profesionalismen ASN	Meningkatnya Administrasi Kepegawalan	Nilai Sistem Merit Lingkup Bidang Pengadaan, Fasilitasi ASN, Disiplin, Pemberhentian dan Penghargaan	Pemerintahan SMART	Birokrasi bebas korupsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) (angka Provinsi)	Tujuan dan Sasaran RPJMD di bidang SDM
	Meningkatkan kualitas sistem manajemen kepegawalan	Indeks Sistem Merit		Nilai Sistem Merit Lingkup Bidang Mutasi, Pensiun dan Pembinaan Jabatan Fungsional						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawalan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawalan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat						
% Keselarasan Dokren OPD dengan Dokren Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian indikator Kinerja Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemerintahan SMART	Sinkronisasi APBD dengan Dana Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja		Persentase Keselarasan Program RKPd dengan RPD		Persentase Ketercapaian indikator Kinerja Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)						
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja		Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan						
		Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu						
				Persentase Penyelesaian Dokumen Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan yang Tepat Waktu						
			Meningkatnya ketersediaan Analisis Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis data perencanaan pembangunan daerah						
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah						
Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit/reviu/monitoring	Persentase hasil audit/reviu/monitoring yang ditindaklanjuti	Pemerintahan SMART	Birokrasi bebas korupsi	Inspektorat			
Maturitas SPIP		Maturitas SPIP	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Persentase PD dengan maturitas level 7	Pemerintahan SMART	Sinkronisasi APBD dengan Dana Desa				

Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)		Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)		Persentase perangkat daerah dengan kematangan manajemen resiko meningkat			
			Meningkatnya kualitas evaluasi AKIP	Persentase rekomendasi ev sapik ditindaklanjuti			
			Meningkatnya efektifitas pengawasan atas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB Persentase catatan hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti			
			Meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit integritas	Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan tepat waktu Persentase rekomendasi audit integritas yang ditindaklanjuti			
			Meningkatnya efektifitas penegakan korupsi	Persentase rekomendasi monitoring pencegahan korupsi yang ditindaklanjuti			
			Meningkatnya keberhasilan capaian kinerja program prioritas perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program prioritas perangkat daerah dengan kategori baik			
Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian	Persentase Litbangjirap yang Dilaksanakan	Pemerintahan SMART	Lampung Barat Kabupaten Inovatif	Badan Riset Daerah
Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan		Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Memiliki Tingkat Kematangan Tinggi >70			
Nilai Indeks SPBE	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai Indeks SPBE	Terpenuhihnya Kebutuhan atas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Dinas Kominfo
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat dalam Memperoleh Informasi Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Media Komunikasi Publik	Infrastruktur Mantap	Seluruh wilayah terkoneksi	
			Terimplementasinya e-Government	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Persentase Layanan Terintegrasi Sistem e-Gov Persentase OPD Terkoneksi Sistem e-Gov Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Layanan Jaringan e-Gov			
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik	Penyelamatan Arsip Statis (Arsip bernilai sejarah sebagai warisan budaya)	Persentase Arsip Statis yang diselamatkan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan	Persentase OPD, Perusahaan, Ormas/Orpol yang dilakukan Pengawasan			
			Meningkatnya penyelenggaraan layanan Informasi arsip statis melalui simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional SIKN JIKN	Persentase arsip yang dilayankan melalui simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional SIKN JIKN			
Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang berorientasi pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Setdakab
Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	(IKM) Pelayanan Adminduk, Perizinan, Perhubungan, RSUD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Dinas DPMPPTSP

					Pemerintahan SMART	Mall Pelayanan Publik				
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Meningkatnya kualitas layanan pencatatan Sipil Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai di tindak lanjuti Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah Birokrasi bebas korupsi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatnya pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	Infratraktur Mantap	Penataan Kota Liwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	Setdakab, Tatakelola, bag SDA
% Infranstruktur Berkondisi Mantab		Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	Meningkatnya Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	Sasaran RPJMD dan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase Lahan Yang disertifikasi	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan Daerah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang memiliki kepastian hukum					Ketahanan Air	
	Meningkatnya Kualitas Penataan bangunan dan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik					Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Sasaran PUPR
	Meningkatnya Kualitas Air bersih dan pengelolaan sanitasi	Persentase Cakupan Air Bersih	Meningkatnya kualitas rumah tinggal berakses air bersih	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Program PUPR
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Infratraktur Mantap	Air minum layak		Infrastruktur serta kapasitas masyarakat terhadap perlindungan dan evakuasi bencana yang memadai serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan iklim serta penurunan	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	Sasaran RPJMD dan tujuan BPBD
					Infratraktur Mantap	Penyediaan air bersih layak dan terjangkau				
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Infratraktur Mantap	Sanitasi sehat dan layak			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur	Persentase Jalan Mantap	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Infratraktur Mantap	Jalan Bagus				
			Meningkatnya kualitas jembatan dalam kondisi baik	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Infratraktur Mantap	Seluruh wilayah terkoneksi				
			Meningkatnya kualitas akses penerangan jalan	Persentase fasilitas penerangan jalan						

Persentase Kecepatan dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya	Persentase Pelayanan Penanganan kebakaran Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatnya kecepatan penanganan kebakaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase waktu tanggap penanganan kebakaran Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	Pemerintahan SMART	Layanan Publik, cepat murah	Satuan Polisi Pamong Praja			
Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Air dan Udara Udara Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi Persentase Jumlah Sampah Tertangani Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Meningkatnya mutu air Meningkatnya mutu udara Meningkatnya lahan bervegetasi Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Meningkatnya pengurangan sampah Meningkatnya penanganan sampah Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah B3	Persentase peningkatan mutu air Persentase peningkatan mutu udara Persentase lahan bervegetasi Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan dan penanganan limbah B3	Lambar Sejuk dan Bersih Pemerintahan SMART Lambar Sejuk dan Bersih	Kabupaten Konservasi Layanan Publik, cepat murah Pekon bersih melalui pengelolaan sampah terintegrasi oleh pekon melalui pemanfaatan Dana Desa	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan luas lahan yang direhabilitasi meningkat serta kualitas perairan sungai dan danau yang meningkat	Kualitas Lingkungan Hidup : Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Pengelolaan sampah : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	Sasaran RPJMD dan Tujuan DLH Program Dinas PUPR Sasaran DLH Sasaran DLH

Tabel 2



Tabel 3

CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025-2030

[illegible]

PROGRAM								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
Sasaran Program	Indikator Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kapemban diberikan kependudukan digital	Jumlah akses KID dibagi jumlah warga KTP yang sudah rekam x 100%	%	5,16	5,38	5,61	5,83	6,06
	Persentase Kapemban kartu identitas Anak	Jumlah anak yang memiliki KIA di bag Jember dibagi KIA x 100%	%	81,70	81,80	81,90	82	82,10

PROGRAM								
PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
Sasaran Program	Indikator Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan Kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diberikan bagi yang melaporkan	Jumlah Akta kematian yang di berikan dibagi jumlah yang melaporkan x100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Akta Kelahiran yang diberikan bagi yang melaporkan	Jumlah Akta kelahiran yang di berikan dibagi jumlah yang melaporkan x100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Akta Perkawinan yang diberikan bagi yang melaporkan	Jumlah Akta Perkawinan yang di berikan dibagi jumlah yang melaporkan x100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Akta pernikahan yang diberikan bagi yang melaporkan	Jumlah Akta pernikahan yang di berikan dibagi jumlah yang melaporkan x100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN

PROGRAM

Peningkatan pemanfaatan data kependudukan						
Indikator Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan	Target			
			2026	2027	2028	2029
Pemertaaan Peningkatan jumlah BSKHODE yang melakukan kerjasama pelayanan modal perjanjian kerjasama s.d tahun 2029	Jumlah perjanjian kerjasama (kuantitas) dibagi jumlah target perjanjian kerjasama s.d tahun 2029	%	42,86	57,14	71,42	85,71
					100	

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
Sasaran Program	Indikator Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
Mengkaji dan Peningkatan Informasi Kependudukan	Pemertaaan Informasi Kependudukan yang di manfaatkan	Jumlah pemertaaan informasi kependudukan yang dibagi dengan jumlah total informasi kependudukan yang tersedia s.d tahun 2029	%	40%	50%	60%	80%
	Pemertaaan Peningkatan perjanjian kerjasama s.d tahun 2029	Jumlah perjanjian kerjasama dibagi dengan perjanjian perjanjian kerjasama s.d tahun 2029	%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM							
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
Sasaran Program	Indikator Program	Formula Pengukuran	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kualitas profil kependudukan	Calangan Pengalasan Profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan kab LB dibagi jumlah Data profil berdasarkan pemertaaan ke IS Tahun 2025 di x 100%	Person	75	78,57	82	85,71
							89,29

SUB KEGIATAN	
--------------	--

KEGIATAN							
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulas Pengukuran	Satuan	Target		
					2026	2027	2028
					2029	2030	2031
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Mula SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mula SKPD	Bergedanya rencana kebutuhan barang mula SKPD	Dokumen	1	1	1

KEGIATAN							
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulas Pengukuran	Satuan	Target		
					2026	2027	2028
					2029	2030	2031
Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Bergedanya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai yang dibuat	Dokumen	1	1	1
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	Bergedanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	2

KEGIATAN							
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulas Pengukuran	Satuan	Target		
					2026	2027	2028
					2029	2030	2031
Tersedianya Komponen Laitik/Perencanaan Anggaran Kantor yang di selesaikan		Jumlah Paket Komponen Laitik/Perencanaan Anggaran Kantor yang di selesaikan	Bergedanya Paket Komponen Laitik/Perencanaan Anggaran Kantor yang di selesaikan	Paket	1	1	1
Tersedianya Perawatan dan Perbaikan Kantor		Jumlah Paket perawatan dan perbaikan kantor yang di selesaikan	Bergedanya Paket perawatan dan perbaikan kantor yang di selesaikan	Paket	1	1	1
Tersedianya Barang catokan dan pengendalian yang di selesaikan		Jumlah Paket Barang Catokan dan Pengendalian yang di selesaikan	Bergedanya Paket Barang Catokan dan Pengendalian yang di selesaikan	Paket	1	1	1
Tersedianya Bahan Baku dan Perundang-undangan yang di selesaikan		Jumlah dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang di selesaikan	Bergedanya dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang di selesaikan	Dokumen	4	4	4
Tersedianya Fasilitas Kurungan Tandu		Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tandu	Bergedanya Laporan Fasilitas Kurungan Tandu	Laporan	1	1	1
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komusial SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komusial SKPD	Bergedanya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komusial SKPD	Laporan	1	1	1

KEGIATAN							
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulas Pengukuran	Satuan	Target		
					2026	2027	2028
					2029	2030	2031
Tersedianya pengisian barang mla daerah		Jumlah Barang Mula Daerah Pengisian Unsur Pemertintah Daerah yang di selesaikan	Bergedanya Barang Mula Daerah Pengisian Unsur Pemertintah Daerah yang di selesaikan	Unit	36	36	36

KEGIATAN							
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulas Pengukuran	Satuan	Target		
					2026	2027	2028
					2029	2030	2031
Tersedianya kegiatan surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bergedanya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibuat	Laporan	1	1	1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di selesaikan	Bergedanya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di selesaikan	Laporan	1	1	1
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di selesaikan	Bergedanya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di selesaikan	Laporan	1	1	1

Penyusunan Pagoran dan Analisa Progres Realisasi Anggaran							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Dokumen Pagoran dan Analisa Progres Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pagoran dan Analisa Progres Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	2	2

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Mula SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mula SKPD	Dokumen	1	1	1	1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	2	2

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Komponen Laitik/Perencanaan Anggaran Kantor yang di selesaikan		Jumlah Paket Komponen Laitik/Perencanaan Anggaran Kantor yang di selesaikan	Paket	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Perawatan dan Perbaikan Kantor		Jumlah Paket perawatan dan perbaikan kantor yang di selesaikan	Paket	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Barang catokan dan pengendalian yang di selesaikan		Jumlah Paket Barang Catokan dan Pengendalian yang di selesaikan	Paket	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Bahan Baku dan Perundang-undangan yang di selesaikan		Jumlah dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang di selesaikan	Dokumen	4	4	4	4

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Fasilitas Kurungan Tandu		Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tandu	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komusial SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komusial SKPD	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya mabul		Jumlah Paket Mabul yang di selesaikan	unit	20	20	20	20

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Perawatan dan Masin Listrik		Jumlah Unit Perawatan dan Masin Listrik yang di selesaikan	unit	10	10	10	10

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di selesaikan	Unit	5	5	5	5

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya kegiatan surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di selesaikan	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
				2026	2027	2028	2029
				2030	2031	2032	2033
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di selesaikan	Laporan	1	1	1	1

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1
--	--	---------	---	---	---	---	---

KEGIATAN								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terjadinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Retribusi Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	20	20	20	20	20

SUB REGIATAN							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	4	4	4	4

SUB KEGIATAN							
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diolah	unit	6	6	6	6	6

SUB KEGIATAN							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terkaitnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubah	Unit	2	2	2	2	2

KEGIATAN								
		Program, Pendidikan, Penelitian						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Perencanaan	Saluran	Target				
				2016	2017	2018	2019	2020
Tertarikannya Penelitian, Penelitiannya dan Penelitian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Penelitiannya dan Penelitian	Dokumen Hasil Penelitian, Penelitiannya dan Penelitian		1	1	1	1	1
Mengartikan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Pelayanan Pendidikan	Laporan Hasil Penyelidikan Pelayanan Pendidikan	Laporan	1	1	1	1	1
Tertarikannya Penenaban Dokumen	Jumlah Laporan Penenaban Dokumen	Laporan Penenaban Dokumen	Laporan	2	2	2	2	2

SUB KEGIATAN							
Pencetakan, Penertbitan dan Penyebaran Dokumen atas Pendaftaran Produk							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pelaksanaan Pencetakan, Penertbitan dan Penyebaran Dokumen Atas Pendaftaran Produk	Jumlah Dokumen Hasil Pencetakan, Penertbitan dan Penyebaran Dokumen Atas Pendaftaran Produk	Dokumen	1	1	1	1	—

SUB KEGIATAN							
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	---

SUB KEGIATAN							
Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	2	2	2	2	—

KEGIATAN								
Penyenggaraan Pendidikan Pendidikan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Tahun				
				2008	2007	2006	2005	2000
Terselenggaranya Pendidikan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendidikan Pendidikan	Laporan Hasil Fasilitas pendidikan Pendidikan	Laporan	1	1	1	1	1
Terselenggaranya Pendidikan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendidikan Pendidikan	Laporan hasil pendidikan pendidikan Pendidikan	Laporan	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Fasilitas Pendidikan Produktif							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terselenggaranya Pendidikan Produktif	Jumlah Laporan hasil Fasilitas pendidikan produktif	Laporan	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tercapainya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1

KEGIATAN								
Pelayanan Penerimaan Sipil								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya pelayanan Administrasi Penerimaan Sipil	Jumlah Layanan Penerimaan Sipil yang digelutikan	jumlah populasi orang yang akan digelutikan (jika kelahiran, atau kematian, atau pernikahan)	Layanan	3	3	3	3	3

SUB KEGIATAN							
Perincian dalam Pelayanan Pencetakan Sigi							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Terdapatnya pelayanan Administrasi Pencetakan Sigi	Jumlah Layanan Pencetakan Sigi yang ditunjukkan	Layanan	3	3	3	3	3

KEGIATAN									
Peningkatan Peranan Bpti									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Sasaran	Tingkat					
				2006	2007	2008	2009	2010	
Teknologi Pelayanan secara Ad Pendaftaran-Pendaftaran Kependudukan dan Persepsi Persepsi Persepsi	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Ad Pendaftaran-Pendaftaran Kependudukan dan Persepsi Persepsi Persepsi	pelaksanaan adu per tahun makin 20 tahun lebih	Laporan	1	1	1	1	1	1
Teknologi Laporan Hasil Pertandingan Kompetitif dan Persepsi Persepsi	Jumlah Laporan Hasil Pertandingan Kompetitif dan Persepsi Persepsi	Jumlah layanan kesehatan kependudukan secara Ad Pendaftaran-Pendaftaran	Laporan	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Pelayanan secara ASST (Pelayanan Persiapan Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan Penting terkait Pencatatan Bpt)							
Sesuai Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Terdilaksananya Pelayanan secara ASST Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan Penting	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara ASST Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan Penting terkait Pencatatan Bpt	Laporan		1	1		

SUB KEGIATAN							
Fasilitas terkait Pencetakan Sipi							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya laporan Hasil Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencetakan Sipi	laporan	1	1	1	1	

SUBI KEGIATAN							

KEGIATAN								
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencetakan sipil								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencetakan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencetakan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Laporan Pelaksanaan Bimbingan	Laporan	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN							
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sptl							
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tertindakukannya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sptl	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sptl	Laporan	1	1		1	

KEGIATAN	
----------	--

➡ SUB KEGIATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Pengelahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Didah dan Disajikan	Dokumen yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan setiap bulan dalam 1 tahun	Dokumen	1	1	1	1	—
Terlaksananya Kerja Sama Pemertabatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemertabatan Data Kependudukan	Kerjasama pemertabatan data kependudukan dalam 1 tahun	Laporan	1	1	1	1	1

KEGIATAN

Pembinaan dan Penguatan Penyelesaian masalah awal								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Pengelahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Hasil Fasilitas Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	—	1	1	1	1
Terlaksananya Pengelahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi/Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan	1	1	1	1	1

KEGIATAN

Pembinaan dan Penguatan Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Terhadap Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguatan Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguatan Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1

KEGIATAN

Penguatan Profil Kependudukan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula Pengukuran	Satuan	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disajikan dalam bentuk buku profil	Dokumen	1	1	1	1	1

Pengelahan dan Penyajian Data Kependudukan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Pengelahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Didah dan Disajikan	Dokumen	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

Kerja sama Pemertabatan Data Kependudukan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Kerja Sama Pemertabatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemertabatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

Fasilitas Untuk Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

Sosialisasi Untuk Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

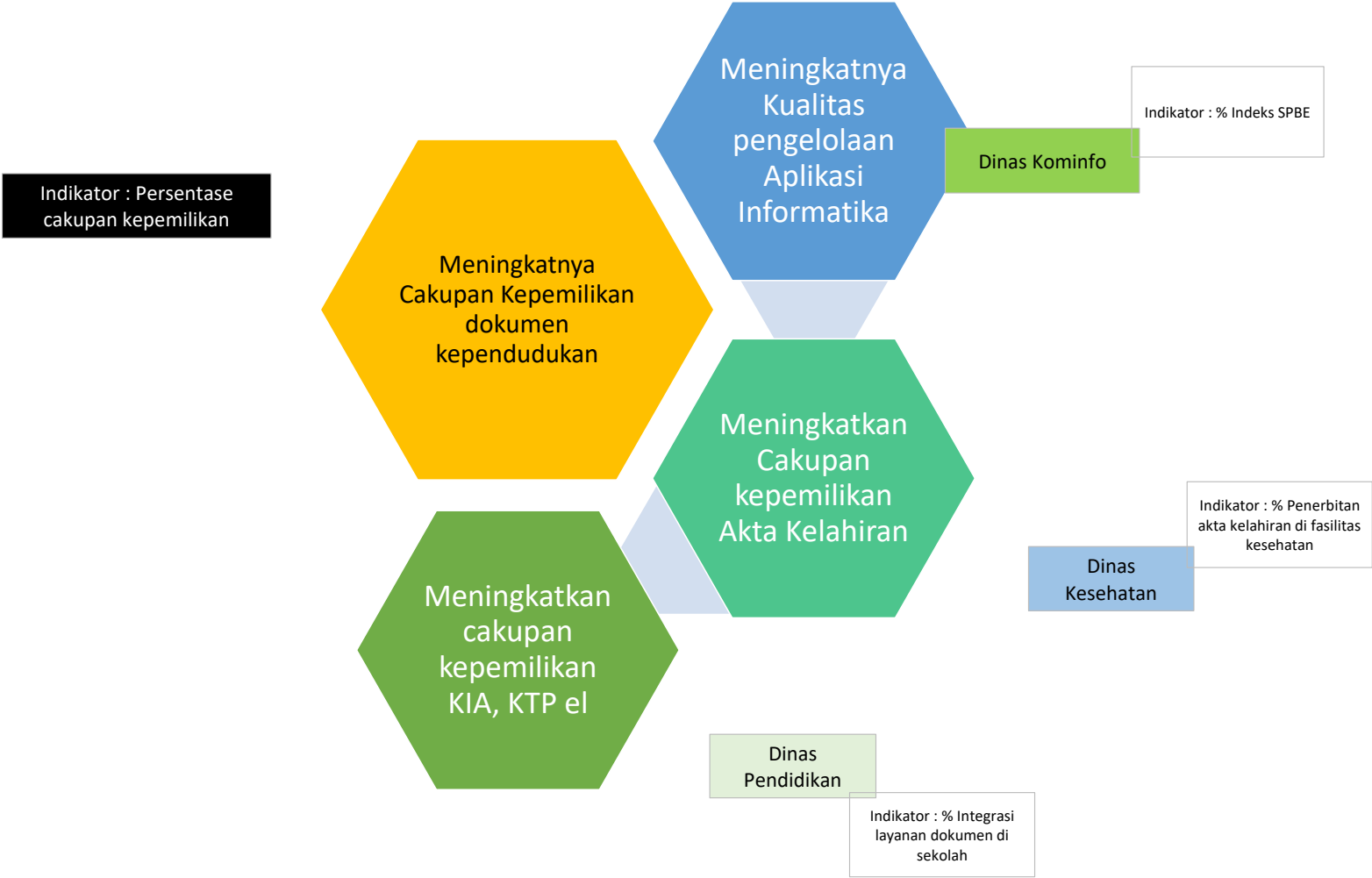
Pembinaan dan Penguatan Terhadap Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Terhadap Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguatan Pengelahan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	

SUB KEGIATAN

Penguatan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	1	1	1	1	

Tabel 4

Crosscutting



Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Base line	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Total s.d. 2030	Lokasi
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.20%	3,847,937,096	80.25%	4,758,230,806	80.30%	5,234,053,886	80.35%	5,757,459,275	80.40%	6,333,205,202	25,930,886,265	Kabupaten Lampung Barat
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41,853,000		46,038,300		50,642,130		55,706,343		61,276,977	255,516,750	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	27,130,000	11 Dokumen	29,843,000	8 Dokumen	32,827,300	11 Dokumen	36,110,030	8 Dokumen	39,721,033	165,631,363	Kab. Lampung Barat
	Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun		5 Dokumen	7,130,000	5 Dokumen	7,843,000	5 Dokumen	8,627,300	5 Dokumen	9,490,030	5 Dokumen	10,439,033	43,529,363	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	7,593,000	12 Laporan	8,352,300	12 Laporan	9,187,530	12 Laporan	10,106,283	12 Laporan	11,116,911	46,356,024	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	27,130,000	11 Dokumen	29,843,000	8 Dokumen	32,827,300	11 Dokumen	36,110,030	8 Dokumen	39,721,033	165,631,363	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,375,000	1 Dokumen	1,512,500	1 Dokumen	1,663,750	1 Dokumen	1,830,125	7,631,375	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	900,000	1 Dokumen	990,000	1 Dokumen	1,089,000	1 Dokumen	1,197,900	1 Dokumen	1,317,690	5,494,590	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,320,000	1 Dokumen	1,452,000	1 Dokumen	1,597,200	1 Dokumen	1,756,920	7,326,120	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumePerubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,210,000	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	1,464,100	6,105,100	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		1 Dokumen	2,780,000	1 Dokumen	3,058,000	1 Dokumen	3,363,800	1 Dokumen	3,700,180	1 Dokumen	4,070,198	16,972,178	Kab. Lampung Barat
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkaDaerah		12 Dokumen	7,593,000	12 Dokumen	8,352,300	12 Dokumen	9,187,530	12 Dokumen	10,106,283	12 Dokumen	11,116,911	46,356,024	Kab. Lampung Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,085,756,596		3,394,332,256		3,733,765,481		4,107,142,029		4,517,856,232	18,838,852,594	Kab. Lampung Barat
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		28 orang	3,080,256,596	28 orang	3,388,282,256	28 orang	3,727,110,481	28 orang	4,099,821,529	28 orang	4,509,803,682	18,805,274,544	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,750,000	1 Dokumen	3,025,000	1 Dokumen	3,327,500	1 Dokumen	3,660,250	15,262,750	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,100,000	2 Dokumen	1,210,000	2 Dokumen	1,331,000	2 Dokumen	1,464,100	6,105,100	Kab. Lampung Barat

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	2,420,000	2 Dokumen	2,662,000	2 Dokumen	2,928,200	Kab. Lampung Barat
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		28 ASN	3,080,256,596	28 ASN	3,388,282,256	28 ASN	3,727,110,481	28 ASN	4,099,821,529	28 ASN	4,509,803,682	18,805,274,544 Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,750,000	1 Dokumen	3,025,000	1 Dokumen	3,327,500	1 Dokumen	3,660,250	15,262,750 Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,100,000	2 Dokumen	1,210,000	2 Dokumen	1,331,000	2 Dokumen	1,464,100	6,105,100 Kab. Lampung Barat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	2,420,000	2 Dokumen	2,662,000	2 Dokumen	2,928,200	12,210,200 Kab. Lampung Barat
Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD		1 Dokumen	7,937,000	1 Dokumen	8,730,700	1 Dokumen	9,603,770	1 Dokumen	10,564,147	1 Dokumen	11,620,562	48,456,179 Kab. Lampung Barat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD		1 Dokumen	7,937,000	1 Dokumen	8,730,700	1 Dokumen	9,603,770	1 Dokumen	10,564,147	1 Dokumen	11,620,562	48,456,179 Kab. Lampung Barat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28,628,000		56,490,800		62,139,880		68,353,868		75,189,255	290,801,803 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	8,628,000	1 Dokumen	9,490,800	1 Dokumen	10,439,880	1 Dokumen	11,483,868	1 Dokumen	12,632,255	52,674,803 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	20,000,000	4 Orang	22,000,000	4 Orang	24,200,000	4 Orang	26,620,000	4 Orang	29,282,000	122,102,000 Kab. Lampung Barat
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan		30 Orang		30 Orang	25,000,000	30 Orang	27,500,000	30 Orang	30,250,000	30 Orang	33,275,000	116,025,000 Kab. Lampung Barat
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	8,628,000	1 Dokumen	9,490,800	1 Dokumen	10,439,880	1 Dokumen	11,483,868	1 Dokumen	12,632,255	52,674,803 Kab. Lampung Barat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	20,000,000	4 Orang	22,000,000	4 Orang	24,200,000	4 Orang	26,620,000	4 Orang	29,282,000	122,102,000 Kab. Lampung Barat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		30 Orang		30 Orang	25,000,000	30 Orang	27,500,000	30 Orang	30,250,000	30 Orang	33,275,000	116,025,000 Kab. Lampung Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah				232,611,000		255,872,100		281,459,310		309,605,241		340,565,765	1,420,113,416 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		1 paket	3,633,000	1 paket	3,996,300	1 paket	4,395,930	1 paket	4,835,523	1 paket	5,319,075	22,179,828 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		1 paket	30,050,000	1 paket	33,055,000	1 paket	36,360,500	1 paket	39,996,550	1 paket	43,996,205	183,458,255 Kab. Lampung Barat
	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	3,960,000	4 Dokumen	4,356,000	4 Dokumen	4,791,600	4 Dokumen	5,270,760	4 Dokumen	5,797,836	24,176,196 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 laporan	4,968,000	1 laporan	5,464,800	1 laporan	6,011,280	1 laporan	6,612,408	1 laporan	7,273,649	30,330,137 Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	190,000,000	1 laporan	209,000,000	1 laporan	229,900,000	1 laporan	252,890,000	1 laporan	278,179,000	1,159,969,000 Kab. Lampung Barat

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		1	paket	3,633,000	1	paket	3,996,300	1	paket	4,395,930	1	paket	4,835,523	1	paket	5,319,075	22,179,828	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan		1	paket	30,050,000	1	paket	33,055,000	1	paket	36,360,500	1	paket	39,996,550	1	paket	43,996,205	183,458,255	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4	Dokumen	3,960,000	4	Dokumen	4,356,000	4	Dokumen	4,791,600	4	Dokumen	5,270,760	4	Dokumen	5,797,836	24,176,196	Kab. Lampung Barat
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	laporan	4,968,000	1	laporan	5,464,800	1	laporan	6,011,280	1	laporan	6,612,408	1	laporan	7,273,649	30,330,137	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	laporan	190,000,000	1	laporan	209,000,000	1	laporan	229,900,000	1	laporan	252,890,000	1	laporan	278,179,000	1,159,969,000	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		11	unit	185,950,000	20	unit	224,545,000	25	unit	246,999,500	25	unit	271,699,450	25	unit	298,869,395	1,228,063,345	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	unit	6,000,000	10	unit	6,600,000	15	unit	7,260,000	15	unit	7,986,000	15	unit	8,784,600	36,630,600	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	unit	179,950,000	10	unit	197,945,000	10	unit	217,739,500	10	unit	239,513,450	10	unit	263,464,795	1,098,612,745	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit		2	unit	20,000,000	2	unit	22,000,000	2	unit	24,200,000	2	unit	26,620,000	92,820,000	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91,535,000			561,188,500			617,307,350			679,038,085			746,941,894	2,696,010,829	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,200,000	1	laporan	2,420,000	1	laporan	2,662,000	1	laporan	2,928,200	12,210,200	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	44,535,000	1	laporan	48,988,500	1	laporan	53,887,350	1	laporan	59,276,085	1	laporan	65,203,694	271,890,629	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	laporan	45,000,000	1	laporan	510,000,000	1	laporan	561,000,000	1	laporan	617,100,000	1	laporan	678,810,000	2,411,910,000	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,200,000	1	laporan	2,420,000	1	laporan	2,662,000	1	laporan	2,928,200	12,210,200	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	44,535,000	1	laporan	48,988,500	1	laporan	53,887,350	1	laporan	59,276,085	1	laporan	65,203,694	271,890,629	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	laporan	45,000,000	1	laporan	510,000,000	1	laporan	561,000,000	1	laporan	617,100,000	1	laporan	678,810,000	2,411,910,000	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		10	unit	143,060,000	10	unit	177,366,000	10	unit	195,102,600	10	unit	214,612,860	10	unit	236,074,146	966,215,606	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	unit	106,050,000	4	unit	116,655,000	4	unit	128,320,500	4	unit	141,152,550	4	unit	155,267,805	647,445,855	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	unit	9,510,000	3	unit	10,461,000	3	unit	11,507,100	3	unit	12,657,810	3	unit	13,923,591	58,059,501	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	27,500,000	1	unit	30,250,000	1	unit	33,275,000	1	unit	36,602,500	1	unit	40,262,750	167,890,250	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		2	unit		2	unit	20,000,000	2	unit	22,000,000	2	unit	24,200,000	2	unit	26,620,000	92,820,000	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital			3.16%	519,263,500		3.38%	591,189,850		3.61%	650,308,835		3.83%	715,339,719		4.06%	786,873,690	3,262,975,594	Kab. Lampung Barat
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)			81.70%			81.80%		81.90%		82.00%		82.10%						Kab. Lampung Barat

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	Dokumen	112,527,000	1	Dokumen	123,779,700	1	Dokumen	136,157,670	1	Dokumen	149,773,437	1	Dokumen	164,750,781	686,988,588	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	laporan	275,071,500	1	laporan	302,578,650	1	laporan	332,836,515	1	laporan	366,120,167	1	laporan	402,732,183	1,679,339,015	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2	laporan	49,700,000	2	laporan	54,670,000	2	laporan	60,137,000	2	laporan	66,150,700	2	laporan	72,765,770	303,423,470	Kab. Lampung Barat
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	Dokumen	112,527,000	1	Dokumen	123,779,700	1	Dokumen	136,157,670	1	Dokumen	149,773,437	1	Dokumen	164,750,781	686,988,588	Kab. Lampung Barat
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	laporan	275,071,500	1	laporan	302,578,650	1	laporan	332,836,515	1	laporan	366,120,167	1	laporan	402,732,183	1,679,339,015	Kab. Lampung Barat
Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2	laporan	49,700,000	2	laporan	54,670,000	2	laporan	60,137,000	2	laporan	66,150,700	2	laporan	72,765,770	303,423,470	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		1	laporan	81,965,000	1	laporan	90,161,500	1	laporan	99,177,650	1	laporan	109,095,415	1	laporan	120,004,957	500,404,522	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1	laporan	-	1	laporan	20,000,000	1	laporan	22,000,000	1	laporan	24,200,000	1	laporan	26,620,000	92,820,000	Kab. Lampung Barat
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		1	laporan	81,965,000	1	laporan	90,161,500	1	laporan	99,177,650	1	laporan	109,095,415	1	laporan	120,004,957	500,404,522	Kab. Lampung Barat
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1	laporan		1	laporan	20,000,000	1	laporan	22,000,000	1	laporan	24,200,000	1	laporan	26,620,000	92,820,000	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%	155,199,500		100%	198,719,450		100%	218,591,395		100%	240,450,535		100%	264,495,588	1,077,456,467	Kab. Lampung Barat
	Persentase akta kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%			Kab. Lampung Barat
	Persentase akta perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%			Kab. Lampung Barat
	Persentase akta perceraian yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%			Kab. Lampung Barat
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		3	layanan	65,042,000	3	layanan	71,546,200	3	layanan	78,700,820	3	layanan	86,570,902	3	layanan	95,227,992	397,087,914	Kab. Lampung Barat
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		3	layanan	65,042,000	3	layanan	71,546,200	3	layanan	78,700,820	3	layanan	86,570,902	3	layanan	95,227,992	397,087,914	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		1	Laporan	-	1	Laporan	28,000,000	1	Laporan	30,800,000	1	Laporan	33,880,000	1	Laporan	37,268,000	129,948,000	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		1	Laporan	27,084,000	1	Laporan	29,792,400	1	Laporan	32,771,640	1	Laporan	36,048,804	1	Laporan	39,653,684	165,350,528	Kab. Lampung Barat
Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil			Laporan			Laporan	28,000,000		Laporan	30,800,000		Laporan	33,880,000		Laporan	37,268,000	129,948,000	Kab. Lampung Barat
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		1	Laporan	27,084,000	1	Laporan	29,792,400	1	Laporan	32,771,640	1	Laporan	36,048,804	1	Laporan	39,653,684	165,350,528	Kab. Lampung Barat
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil		1	Laporan	63,073,500	1	Laporan	69,380,850	1	Laporan	76,318,935	1	Laporan	83,950,829	1	Laporan	92,345,911	385,070,025	Kab. Lampung Barat

Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil		1	Laporan	63,073,500	1	Laporan	69,380,850	1	Laporan	76,318,935	1	Laporan	83,950,829	1	Laporan	92,345,911	385,070,025	Kab. Lampung Barat					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan		40%		694,460,000	50%		233,906,000	63%		257,296,600	81%		283,026,260	100%		311,328,886	1,780,017,746	Kab. Lampung Barat					
	Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti		100%			100%			100%			100%			100%				Kab. Lampung Barat					
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1	dokumen	600,000,000	1	dokumen	75,000,000	1	dokumen	82,500,000	1	dokumen	90,750,000	1	dokumen	99,825,000	948,075,000	Kab. Lampung Barat					
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		3	dokumen	40,568,000	3	dokumen	44,624,800	3	dokumen	49,087,280	3	dokumen	53,996,008	3	dokumen	59,395,609	247,671,697	Kab. Lampung Barat					
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan		1	dokumen	600,000,000	1	dokumen	75,000,000	1	dokumen	82,500,000	1	dokumen	90,750,000	1	dokumen	99,825,000	948,075,000	Kab. Lampung Barat					
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	dokumen	40,568,000	1	dokumen	44,624,800	1	dokumen	49,087,280	1	dokumen	53,996,008	1	dokumen	59,395,609	247,671,697	Kab. Lampung Barat					
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	-	1	laporan	30,000,000	1	laporan	33,000,000	1	laporan	36,300,000	1	laporan	39,930,000	139,230,000	Kab. Lampung Barat					
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	-	1	laporan	25,000,000	1	laporan	27,500,000	1	laporan	30,250,000	1	laporan	33,275,000	116,025,000	Kab. Lampung Barat					
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1	laporan	28,580,000	1	laporan	31,438,000	1	laporan	34,581,800	1	laporan	38,039,980	1	laporan	41,843,978	174,483,758	Kab. Lampung Barat					
Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Laporan		1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	33,000,000	1	Laporan	36,300,000	1	Laporan	39,930,000	139,230,000	Kab. Lampung Barat					
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Laporan		1	Laporan	25,000,000	1	Laporan	27,500,000	1	Laporan	30,250,000	1	Laporan	33,275,000	116,025,000	Kab. Lampung Barat					
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1	Laporan	28,580,000	1	Laporan	31,438,000	1	Laporan	34,581,800	1	Laporan	38,039,980	1	Laporan	41,843,978	174,483,758	Kab. Lampung Barat					
Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	25,312,000	1	laporan	27,843,200	1	laporan	30,627,520	1	laporan	33,690,272	1	laporan	37,059,299	154,532,291	Kab. Lampung Barat					
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	25,312,000	1	laporan	27,843,200	1	laporan	30,627,520	1	laporan	33,690,272	1	laporan	37,059,299	154,532,291	Kab. Lampung Barat					
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		75%		30,721,900	78.57%		33,794,090	82%		37,173,499	85.71%		40,890,849	89.28%		44,979,934	187,560,272	Kab. Lampung Barat					
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1	dokumen		30,721,900	1		dokumen	33,794,090		1	dokumen		37,173,499	1			dokumen	40,890,849	1	dokumen	44,979,934	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1	dokumen		30,721,900	1		dokumen	33,794,090		1	dokumen		37,173,499	1			dokumen	40,890,849	1	dokumen	44,979,934	Kab. Lampung Barat
								-			-			-			-	-	Kab. Lampung Barat					
UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG					30,606,500			33,667,150			37,033,865			40,737,252			44,810,977	186,855,743	Kab. Lampung Barat					

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		1	Paket	3,600,000	1	Paket	3,960,000	1	Paket	4,356,000	1	Paket	4,791,600	1	Paket	5,270,760	21,978,360	Kab. Lampung Barat												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		1	Paket	3,600,000	1	Paket	3,960,000	1	Paket	4,356,000	1	Paket	4,791,600	1	Paket	5,270,760	21,978,360	Kab. Lampung Barat												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	11,250,000	1	Laporan	12,375,000	1	Laporan	13,612,500	1	Laporan	14,973,750	1	Laporan	16,471,125	68,682,375	Kab. Lampung Barat												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	15,756,500	1	Laporan	17,332,150	1	Laporan	19,065,365	1	Laporan	20,971,902	1	Laporan	23,069,092	96,195,008	Kab. Lampung Barat												
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	11,250,000	1	Laporan	12,375,000	1	Laporan	13,612,500	1	Laporan	14,973,750	1	Laporan	16,471,125	68,682,375	Kab. Lampung Barat												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	15,756,500	1	Laporan	17,332,150	1	Laporan	19,065,365	1	Laporan	20,971,902	1	Laporan	23,069,092	96,195,008	Kab. Lampung Barat												
					5,247,581,996						5,815,840,196						6,397,424,215						7,037,166,637						7,740,883,300	32,238,896,344	

Bidang Urusan /Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan output	Indikator Outcome, Output	Base line	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.20%	3,921,704,496	80.25%	4,362,007,046	80.30%	4,771,207,750	80.35%	5,221,328,525	80.40%	5,716,461,378	Kabupaten Lampung Barat
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41,853,000		46,038,300		50,642,130		55,706,343		61,276,977	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	27,130,000	11 Dokumen	29,843,000	8 Dokumen	32,827,300	11 Dokumen	36,110,030	8 Dokumen	39,721,033	Kab. Lampung Barat
	Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun		5 Dokumen	7,130,000	5 Dokumen	7,843,000	5 Dokumen	8,627,300	5 Dokumen	9,490,030	5 Dokumen	10,439,033	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	7,593,000	12 Laporan	8,352,300	12 Laporan	9,187,530	12 Laporan	10,106,283	12 Laporan	11,116,911	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	27,130,000	11 Dokumen	29,843,000	8 Dokumen	32,827,300	11 Dokumen	36,110,030	8 Dokumen	39,721,033	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,375,000	1 Dokumen	1,512,500	1 Dokumen	1,663,750	1 Dokumen	1,830,125	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	900,000	1 Dokumen	990,000	1 Dokumen	1,089,000	1 Dokumen	1,197,900	1 Dokumen	1,317,690	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,320,000	1 Dokumen	1,452,000	1 Dokumen	1,597,200	1 Dokumen	1,756,920	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumePerubahan DPA- SKPD		1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,210,000	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	1,464,100	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		1 Dokumen	2,780,000	1 Dokumen	3,058,000	1 Dokumen	3,363,800	1 Dokumen	3,700,180	1 Dokumen	4,070,198	Kab. Lampung Barat
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkaDaerah		12 Dokumen	7,593,000	12 Dokumen	8,352,300	12 Dokumen	9,187,530	12 Dokumen	10,106,283	12 Dokumen	11,116,911	Kab. Lampung Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,085,756,596		3,394,332,256		3,733,765,481		4,107,142,029		4,517,856,232	Kab. Lampung Barat
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		28 orang	3,080,256,596	28 orang	3,388,282,256	28 orang	3,727,110,481	28 orang	4,099,821,529	28 orang	4,509,803,682	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,750,000	1 Dokumen	3,025,000	1 Dokumen	3,327,500	1 Dokumen	3,660,250	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,100,000	2 Dokumen	1,210,000	2 Dokumen	1,331,000	2 Dokumen	1,464,100	Kab. Lampung Barat

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	2,420,000	2 Dokumen	2,662,000	2 Dokumen	2,928,200	Kab. Lampung Barat
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		28 ASN	3,080,256,596	28 ASN	3,388,282,256	28 ASN	3,727,110,481	28 ASN	4,099,821,529	28 ASN	4,509,803,682	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,750,000	1 Dokumen	3,025,000	1 Dokumen	3,327,500	1 Dokumen	3,660,250	Kab. Lampung Barat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,100,000	2 Dokumen	1,210,000	2 Dokumen	1,331,000	2 Dokumen	1,464,100	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	2,420,000	2 Dokumen	2,662,000	2 Dokumen	2,928,200	Kab. Lampung Barat
Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD		1 Dokumen	7,937,000	1 Dokumen	8,730,700	1 Dokumen	9,603,770	1 Dokumen	10,564,147	1 Dokumen	11,620,562	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD		1 Dokumen	7,937,000	1 Dokumen	8,730,700	1 Dokumen	9,603,770	1 Dokumen	10,564,147	1 Dokumen	11,620,562	Kab. Lampung Barat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28,628,000		56,490,800		62,139,880		68,353,868		75,189,255	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	8,628,000	1 Dokumen	9,490,800	1 Dokumen	10,439,880	1 Dokumen	11,483,868	1 Dokumen	12,632,255	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	20,000,000	4 Orang	22,000,000	4 Orang	24,200,000	4 Orang	26,620,000	4 Orang	29,282,000	Kab. Lampung Barat
													Kab. Lampung Barat
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan		30 Orang		30 Orang	25,000,000	30 Orang	27,500,000	30 Orang	30,250,000	30 Orang	33,275,000	Kab. Lampung Barat
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	8,628,000	1 Dokumen	9,490,800	1 Dokumen	10,439,880	1 Dokumen	11,483,868	1 Dokumen	12,632,255	Kab. Lampung Barat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	20,000,000	4 Orang	22,000,000	4 Orang	24,200,000	4 Orang	26,620,000	4 Orang	29,282,000	Kab. Lampung Barat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		30 Orang		30 Orang	25,000,000	30 Orang	27,500,000	30 Orang	30,250,000	30 Orang	33,275,000	Kab. Lampung Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah				303,400,000		316,872,100		321,559,310		326,715,241		332,386,765	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		1 paket	3,633,000	1 paket	3,996,300	1 paket	4,395,930	1 paket	4,835,523	1 paket	5,319,075	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		1 paket	30,050,000	1 paket	33,055,000	1 paket	36,360,500	1 paket	39,996,550	1 paket	43,996,205	Kab. Lampung Barat
	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	3,960,000	4 Dokumen	4,356,000	4 Dokumen	4,791,600	4 Dokumen	5,270,760	4 Dokumen	5,797,836	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 laporan	4,968,000	1 laporan	5,464,800	1 laporan	6,011,280	1 laporan	6,612,408	1 laporan	7,273,649	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	260,789,000	1 laporan	270,000,000	1 laporan	270,000,000	1 laporan	270,000,000	1 laporan	270,000,000	Kab. Lampung Barat

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		1	paket	3,633,000	1	paket	3,996,300	1	paket	4,395,930	1	paket	4,835,523	1	paket	5,319,075	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan		1	paket	30,050,000	1	paket	33,055,000	1	paket	36,360,500	1	paket	39,996,550	1	paket	43,996,205	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4	Dokumen	3,960,000	4	Dokumen	4,356,000	4	Dokumen	4,791,600	4	Dokumen	5,270,760	4	Dokumen	5,797,836	Kab. Lampung Barat
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	laporan	4,968,000	1	laporan	5,464,800	1	laporan	6,011,280	1	laporan	6,612,408	1	laporan	7,273,649	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	laporan	260,789,000	1	laporan	270,000,000	1	laporan	270,000,000	1	laporan	270,000,000	1	laporan	270,000,000	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		11	unit	185,950,000	20	unit	224,545,000	25	unit	246,999,500	25	unit	271,699,450	25	unit	298,869,395	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	unit	6,000,000	10	unit	6,600,000	15	unit	7,260,000	15	unit	7,986,000	15	unit	8,784,600	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	unit	179,950,000	10	unit	197,945,000	10	unit	217,739,500	10	unit	239,513,450	10	unit	263,464,795	Kab. Lampung Barat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit		2	unit	20,000,000	2	unit	22,000,000	2	unit	24,200,000	2	unit	26,620,000	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94,513,400			103,964,740			114,361,214			125,797,335			138,377,069	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,200,000	1	laporan	2,420,000	1	laporan	2,662,000	1	laporan	2,928,200	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	44,535,000	1	laporan	48,988,500	1	laporan	53,887,350	1	laporan	59,276,085	1	laporan	65,203,694	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	laporan	47,978,400	1	laporan	52,776,240	1	laporan	58,053,864	1	laporan	63,859,250	1	laporan	70,245,175	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	2,000,000	1	laporan	2,200,000	1	laporan	2,420,000	1	laporan	2,662,000	1	laporan	2,928,200	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	44,535,000	1	laporan	48,988,500	1	laporan	53,887,350	1	laporan	59,276,085	1	laporan	65,203,694	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	laporan	47,978,400	1	laporan	52,776,240	1	laporan	58,053,864	1	laporan	63,859,250	1	laporan	70,245,175	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		10	unit	143,060,000	10	unit	177,366,000	10	unit	195,102,600	10	unit	214,612,860	10	unit	236,074,146	Kab. Lampung Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	unit	106,050,000	4	unit	116,655,000	4	unit	128,320,500	4	unit	141,152,550	4	unit	155,267,805	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	unit	9,510,000	3	unit	10,461,000	3	unit	11,507,100	3	unit	12,657,810	3	unit	13,923,591	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	27,500,000	1	unit	30,250,000	1	unit	33,275,000	1	unit	36,602,500	1	unit	40,262,750	Kab. Lampung Barat
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		2	unit		2	unit	20,000,000	2	unit	22,000,000	2	unit	24,200,000	2	unit	26,620,000	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital			3.16%	519,263,500		3.38%	591,189,850		3.61%	650,308,835		3.83%	715,339,719		4.06%	786,873,690	Kab. Lampung Barat
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)			81.70%			81.80%			81.90%			82.00%			82.10%		Kab. Lampung Barat

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	Dokumen	112,527,000	1	Dokumen	123,779,700	1	Dokumen	136,157,670	1	Dokumen	149,773,437	1	Dokumen	164,750,781	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	laporan	275,071,500	1	laporan	302,578,650	1	laporan	332,836,515	1	laporan	366,120,167	1	laporan	402,732,183	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2	laporan	49,700,000	2	laporan	54,670,000	2	laporan	60,137,000	2	laporan	66,150,700	2	laporan	72,765,770	Kab. Lampung Barat
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	Dokumen	112,527,000	1	Dokumen	123,779,700	1	Dokumen	136,157,670	1	Dokumen	149,773,437	1	Dokumen	164,750,781	Kab. Lampung Barat
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	laporan	275,071,500	1	laporan	302,578,650	1	laporan	332,836,515	1	laporan	366,120,167	1	laporan	402,732,183	Kab. Lampung Barat
Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2	laporan	49,700,000	2	laporan	54,670,000	2	laporan	60,137,000	2	laporan	66,150,700	2	laporan	72,765,770	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk		1	laporan	81,965,000	1	laporan	90,161,500	1	laporan	99,177,650	1	laporan	109,095,415	1	laporan	120,004,957	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1	laporan	-	1	laporan	20,000,000	1	laporan	22,000,000	1	laporan	24,200,000	1	laporan	26,620,000	Kab. Lampung Barat
Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk		1	laporan	81,965,000	1	laporan	90,161,500	1	laporan	99,177,650	1	laporan	109,095,415	1	laporan	120,004,957	Kab. Lampung Barat
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1	laporan		1	laporan	20,000,000	1	laporan	22,000,000	1	laporan	24,200,000	1	laporan	26,620,000	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%	155,199,500		100%	198,719,450		100%	218,591,395		100%	240,450,535		100%	264,495,588	Kab. Lampung Barat
	Persentase akta kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%		Kab. Lampung Barat
	Persentase akta perkawinan yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%		Kab. Lampung Barat
	Persentase akta perceraian yang di terbitkan bagi yang melaporkan			100%			100%			100%			100%			100%		Kab. Lampung Barat
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		3	layanan	65,042,000	3	layanan	71,546,200	3	layanan	78,700,820	3	layanan	86,570,902	3	layanan	95,227,992	Kab. Lampung Barat
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		3	layanan	65,042,000	3	layanan	71,546,200	3	layanan	78,700,820	3	layanan	86,570,902	3	layanan	95,227,992	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		1	Laporan	-	1	Laporan	28,000,000	1	Laporan	30,800,000	1	Laporan	33,880,000	1	Laporan	37,268,000	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil		1	Laporan	27,084,000	1	Laporan	29,792,400	1	Laporan	32,771,640	1	Laporan	36,048,804	1	Laporan	39,653,684	Kab. Lampung Barat
Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil			Laporan			Laporan	28,000,000		Laporan	30,800,000		Laporan	33,880,000		Laporan	37,268,000	Kab. Lampung Barat
Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil		1	Laporan	27,084,000	1	Laporan	29,792,400	1	Laporan	32,771,640	1	Laporan	36,048,804	1	Laporan	39,653,684	Kab. Lampung Barat
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil		1	Laporan	63,073,500	1	Laporan	69,380,850	1	Laporan	76,318,935	1	Laporan	83,950,829	1	Laporan	92,345,911	Kab. Lampung Barat

Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil		1	Laporan	63,073,500	1	Laporan	69,380,850	1	Laporan	76,318,935	1	Laporan	83,950,829	1	Laporan	92,345,911	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan		40%		583,330,000	50%		696,663,000	63%		766,329,300	81%		842,962,230	100%		927,258,453	Kab. Lampung Barat
	Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti		100%			100%			100%			100%			100%			Kab. Lampung Barat
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1	dokumen	488,870,000	1	dokumen	537,757,000	1	dokumen	591,532,700	1	dokumen	650,685,970	1	dokumen	715,754,567	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		3	dokumen	40,568,000	3	dokumen	44,624,800	3	dokumen	49,087,280	3	dokumen	53,996,008	3	dokumen	59,395,609	Kab. Lampung Barat
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan		1	dokumen	488,870,000	1	dokumen	537,757,000	1	dokumen	591,532,700	1	dokumen	650,685,970	1	dokumen	715,754,567	Kab. Lampung Barat
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	dokumen	40,568,000	1	dokumen	44,624,800	1	dokumen	49,087,280	1	dokumen	53,996,008	1	dokumen	59,395,609	Kab. Lampung Barat
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	-	1	laporan	30,000,000	1	laporan	33,000,000	1	laporan	36,300,000	1	laporan	39,930,000	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	-	1	laporan	25,000,000	1	laporan	27,500,000	1	laporan	30,250,000	1	laporan	33,275,000	Kab. Lampung Barat
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1	laporan	28,580,000	1	laporan	31,438,000	1	laporan	34,581,800	1	laporan	38,039,980	1	laporan	41,843,978	Kab. Lampung Barat
Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Laporan		1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	33,000,000	1	Laporan	36,300,000	1	Laporan	39,930,000	Kab. Lampung Barat
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Laporan		1	Laporan	25,000,000	1	Laporan	27,500,000	1	Laporan	30,250,000	1	Laporan	33,275,000	Kab. Lampung Barat
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1	Laporan	28,580,000	1	Laporan	31,438,000	1	Laporan	34,581,800	1	Laporan	38,039,980	1	Laporan	41,843,978	Kab. Lampung Barat
Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	25,312,000	1	laporan	27,843,200	1	laporan	30,627,520	1	laporan	33,690,272	1	laporan	37,059,299	Kab. Lampung Barat
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	laporan	25,312,000	1	laporan	27,843,200	1	laporan	30,627,520	1	laporan	33,690,272	1	laporan	37,059,299	Kab. Lampung Barat
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		75%		30,721,900	78.57%		33,794,090	82%		37,173,499	85.71%		40,890,849	89.28%		44,979,934	Kab. Lampung Barat
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1	dokumen		30,721,900	1		dokumen	33,794,090		1	dokumen		37,173,499	1		dokumen
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1	dokumen	30,721,900	1	dokumen	33,794,090	1	dokumen	37,173,499	1	dokumen	40,890,849	1	dokumen	44,979,934	Kab. Lampung Barat
								-			-			-			-	Kab. Lampung Barat
UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG					30,606,500			33,667,150			37,033,865			40,737,252			44,810,977	Kab. Lampung Barat

